



**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



Majalah CogniView dapat diunduh melalui website bpkp.go.id/puslitbangwas.bpkp atau silahkan pindai QRcode di bawah ini:



Diterbitkan oleh:

Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan -
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pembina:

Kepala Pustrajakwas

Penanggung Jawab:

Rury Hanasri

Dewan Redaksi:

Suhadril, M. Tasya Renaldo KM

Staf Redaksi:

Dara Mustika, Nugroho DP

Desain Grafis:

Nuril Qomaryah, Eko Prasodo

Sekretariat:

Eko Rosdiansa P, Mufti MS

CogniView

Alamat Redaksi: Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120; Telepon: 081314639745; Email: puslitbangwas@bpkp.go.id; Website: <https://bpkp.go.id/puslitbangwas.bpkp>; Instagram: [@puslitbangwasbpkp](https://www.instagram.com/@puslitbangwasbpkp); YouTube: Puslitbangwas BPKP

Selamat Datang di edisi terbaru Majalah CogniView,

Pada kesempatan ini, kami dengan bangga mempersembahkan edisi terbaru Majalah CogniView. Nama majalah diambil dari kata “Cognition” yang berarti pemahaman atau pengetahuan, sedangkan “View” yang berarti pandangan. Sebuah nama yang mencerminkan nilai untuk memberikan *insight* terkait pengetahuan, yang digambarkan dalam *tagline* Jendela Pengetahuan Pengawasan Intern. Nama yang menggambarkan visi dan komitmen untuk menjadi jendela pemahaman tentang pengawasan intern.

Dalam edisi ini, kami akan merangkum dan menganalisis beberapa isu sentral yang menjadi fokus perhatian para praktisi dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan dan pengawasan. Di pertengahan tahun ini, ada sesuatu yang istimewa dalam perjalanan Puslitbangwas, yaitu terbitnya Peraturan BPKP Nomor 3 tahun 2023 yang menandai berakhirnya Puslitbangwas dan berganti dengan tambahan tugas dan fungsi baru menjadi Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. Era baru yang memberikan peran bukan hanya penting namun juga sangat krusial, karena unit baru menjadi pembawa arah pengawasan BPKP melalui pemberian rekomendasi isu strategis.

Dinamisasi organisasi lainnya adalah amanat baru tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), hal yang lebih luas dari manajemen risiko di BPKP yang tiga dekade lalu terlahir dari rahim Puslitbangwas. Kami memulai perjalanan ini dengan memahami betapa pentingnya manajemen risiko dalam konteks pembangunan nasional yang terkait dengan lintas sektor. Dalam lingkungan yang terus berubah, mengidentifikasi dan mengelola risiko telah menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan.

Isu strategis lainnya adalah terkait *stunting*, isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Kami akan menjelaskan bagaimana *stunting* mempengaruhi generasi mendatang dan bagaimana pelayanan kesehatan primer serta upaya kolaboratif dapat membantu mengatasi tantangan ini. *Stunting* adalah masalah bersama yang memerlukan komitmen bersama untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Satu lagi fokus pengawasan saat ini adalah program pemerintah terkait peningkatan perekonomian dari pariwisata. Sektor pariwisata tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan destinasi, tetapi juga sumber potensi ekonomi yang signifikan. Pada artikel ini akan dibahas tentang bagaimana analisis daya saing dan kebijakan diplomasi pariwisata dapat membantu Indonesia memanfaatkan kekayaan budaya dan alamnya untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan pengawasan intern, sinergi antara berbagai lembaga adalah kunci. Karena pengawasan intern dilakukan oleh beberapa pihak, kami akan memberikan ringkasan berita terkini dari Rapat Koordinasi Pengawasan Intern yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Temuan pengawasan, kebijakan baru, dan upaya kolaboratif dalam memastikan efektivitas pengawasan akan menjadi sorotan utama.

Di akhir editorial kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda sebagai pembaca setia Majalah Pengawasan Intern. Kami berharap edisi ini memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam tentang isu-isu terkini yang memengaruhi pembangunan dan pengawasan di Indonesia.

Terima kasih dan selamat membaca...

Rury Hanasri

SAYA dengan suka cita mempersembahkan kepada Anda edisi terbaru Majalah CogniView. Dinamika organisasi dengan berubahnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan menjadi Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan tentu membawa beberapa konsekuensi salah satunya terhadap majalah ini. Sebagai pengganti majalah Seputar Litbang yang telah lama menjadi mitra setia bagi para praktisi pengawasan internal, Kami mencoba menghadirkan perubahan untuk lebih melayani dan memberikan inspirasi dalam pengawasan.

Majalah CogniView memiliki misi "menjadi panduan dan sumber inspirasi untuk pengawasan intern yang cermat dan efektif". Dan kami menyadari bahwa dalam pengawasan intern untuk membantu organisasi mengelola risiko, memaksimalkan peluang, dan mencapai tujuan strategis organisasi maka penyediaan informasi tentang pengawasan intern adalah hal penting.



**Amdi
Veri
Darma**

Perubahan nama ini mencerminkan semangat kami untuk terus berinovasi dan berkembang. Kami beralih ke nama "CogniView" untuk menekankan fokus kami pada pemahaman yang lebih dalam, pengetahuan yang lebih luas, dan pandangan yang lebih tajam terkait pengawasan intern. Di era di mana perubahan dan kompleksitas menguasai lanskap bisnis dan kebijakan, memiliki pemahaman yang kuat adalah kunci untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif. Dengan *tagline* "Jendela Pengetahuan Pengawasan Intern" menegaskan komitmen kami untuk menjadi pintu gerbang ke dunia ide-ide cemerlang, praktik terbaik, dan pandangan yang mendalam tentang bagaimana pengawasan intern dapat menjadi kekuatan utama dalam membentuk dan mendukung kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca setia kami yang telah mendukung perjalanan kami sejauh ini. Anda adalah sumber inspirasi bagi kami, dan kami akan terus memberikan konten berkualitas yang relevan dengan tantangan dan peluang yang Anda hadapi dalam pengawasan intern. Saya juga mengucapkan selamat tinggal kepada pembaca seiring dengan pergantian kepemimpinan.

Kami mengundang Anda untuk menjelajahi edisi terbaru Majalah CogniView ini dengan semangat pembelajaran dan pertumbuhan. Bersama-sama, mari kita bangun masa depan pengawasan intern yang lebih cerdas, efektif, dan memberikan kontribusi positif terhadap organisasi dan masyarakat.

Terima kasih atas dukungan Anda, dan selamat membaca!

DAFTAR ISI

4 Sorot

- Manajemen Risiko Pembangunan Nasional: Menjaga Keberlanjutan dan Keamanan Pembangunan

6 Topik Pilihan

- Berantas Stunting: Kawal Bonus Demografi menuju Generasi Emas Indonesia
- Indonesia Sehat: Dipandu Mulai dari Posyandu
- Menggali Potensi Ekonomi dan Diplomasi Kebijakan Pariwisata Indonesia



22 Ekspresi

- Computer Hacking Forensic Investigation: Langkah Investigasi Kejahatan Digital
- Proyek Perubahan dan Peningkatan Kinerja Organisasi

30 Inspirasi

- Karya Tulis Ilmiah Populer: *Call for Book Chapter MRPN*



42 Istilah

- Kamus Istilah Pengawasan

44 Resensi

- Berdaya, Berkarya, Bermakna: Kiprah BPKP Terus Relevan Melintasi Zaman

48 Etika

- *Exploring ChatGPT* dan Kekhawatiran Etis

38 Kilas

- Dorong Peran Serta, Puslitbangwas Bekali Duta KM Materi Pengelolaan Pengetahuan
- Library Café Hadirkan Staf Khusus Menteri PUPR Sharing tentang Fraud PBJ
- Jaga Keunggulan Kompetitif, Puslitbangwas Berkolaborasi Bangun KM Architecture
- Dorong Keberlanjutan Inovasi, 7 Inovasi Pelayanan Publik BPKP Ikut Ajang KIPP 2023

51 Pojok Asah

M. Tasya Renaldo KM

MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL: MENJAGA KEBERLANJUTAN DAN KEAMANAN PEMBANGUNAN

Semua organisasi yang memiliki tujuan pasti memiliki risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Begitu juga tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu risiko tersebut perlu dikelola agar risiko-risiko tersebut tidak menjadi suatu masalah, lalu menjadi krisis, hingga pada akhirnya dapat menjadi bencana, dan pada akhirnya mengakibatkan tujuan gagal tercapai.

Pemerintah telah *aware* mengenai pentingnya manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan bernegara tersebut. Salah satunya adalah penggunaan salah satu indikator berupa Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Level 3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Namun dalam praktiknya, karena target MRI ditujukan untuk tiap instansi pemerintah, sehingga Penerapan manajemen risiko masih silo dan manajemen risiko yang sifatnya terintegrasi menjadi tidak terlalu diperhatikan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur diperlukan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi. Manajemen risiko tersebut dapat diterapkan baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. Terkait hal tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang penerapannya dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, mendorong Entitas MRPN (kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya) lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan; dan memberikan keyakinan bagi entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional.



MRPN ini dibagi menjadi dua yaitu MRPN Organisasi dan MRPN Lintas Sektor. Untuk MRPN Organisasi adalah MRPN yang diterapkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas masing-masing Entitas MRPN sedangkan MRPN Lintas Sektor diterapkan pada MRPN Sektor Utama dan 1 (satu) atau lebih Entitas MRPN lainnya untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu. MRPN Lintas Sektor diterapkan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.

Dengan adanya MRPN ini kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen risiko membantu untuk memastikan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mengelola risiko-risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan, secara terintegrasi dan melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional. Diharapkan jika MRPN telah berjalan secara efektif maka tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dapat tercapai dan seluruh pihak akan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Deny Arka P.

BERANTAS STUNTING: KAWAL BONUS DEMOGRAFI MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA

KOLABORASI LINTAS SEKTORAL MENJADI KUNCI UNTUK MENGENTASKAN STUNTING. STUDI OLEH WORLD BANK MENUNJUKKAN BAHWA PENDANAAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK PENANGANAN STUNTING SUDAH CUKUP MEMADAI, NAMUN EFektivitasnya tergantung pada optimalisasi penggunaan sumber daya.



KEBERADAAN *stunting* terus mengancam bonus demografi Indonesia yang telah banyak digembar-gemborkan. Bonus demografi Indonesia telah diproyeksi akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2030 dengan pergeseran piramida penduduk ke mayoritas kelompok usia dewasa. Bonus demografi menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat karena produktivitas angkatan kerja yang meningkat. Sayangnya, keberadaan *stunting* pada anak-anak dapat mengancam potensi ini. Anak-anak yang mengalami *stunting* pada masa awal kehidupan akan menghadapi risiko kesehatan pada masa dewasanya yang akan berdampak pada kinerja akademik yang buruk dan penurunan produktivitas ketika bekerja.

Penanganan *stunting* oleh pemerintah menjadi kunci penting untuk mencapai cita-cita "Generasi Emas" pada tahun 2045 di mana Indonesia bervisi menjadi negara maju dengan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing di tingkat global. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia perlu mengatasi masalah kompleks *stunting* yang masih melekat di beberapa sektor hingga saat ini. Tulisan ini akan merangkum cerita tentang strategi penanganan *stunting* oleh pemerintah di Indonesia beserta praktik implementasinya yang dirasa belum optimal. Termasuk juga mengidentifikasi kelemahan dalam aspek kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan yang mempengaruhi efektivitas implementasi intervensi.

Stunting adalah masalah serius yang mempengaruhi anak-anak di seluruh dunia dan menjadi fokus perhatian internasional. *Stunting* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun asupan nutrisi yang tidak memadai adalah yang menjadi penyebab utamanya.¹ Penanganan *stunting* memerlukan upaya bersama untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup selama periode kritis pertumbuhan mereka, karena *stunting* dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik, kognitif, dan emosional, serta berdampak buruk pada kinerja sekolah dan kesehatan mereka.^{2,3}

Lebih dari itu, *stunting* bukan hanya sekedar masalah pada kesehatan anak yang erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. *Stunting* juga dianggap menjadi masalah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara-negara di dunia. Menurut penelitian *World Bank*, banyak negara berpendapatan rendah dan menengah telah mengalami kerugian pendapatan per kapita yang bervariasi dari 5% hingga 7% akibat permasalahan *stunting*.⁴ Selain penurunan pendapatan, biaya perawatan kesehatan dan penjaminan kesejahteraan sosial terkait dengan *stunting* juga dapat membebani sumber daya negara yang sudah terbatas.⁵

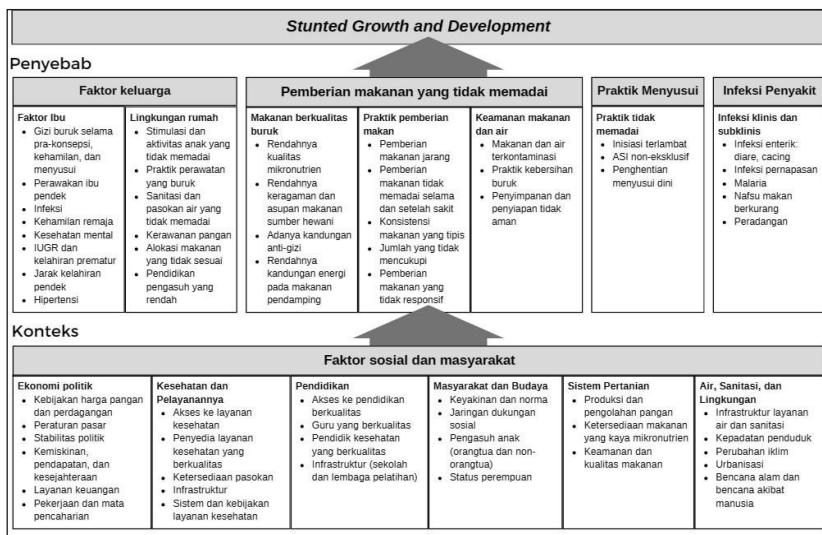
¹ Global nutrition targets 2025: stunting policy brief. Tersedia dan dapat diakses pada <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>

² Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D. dan Neufeld, L.M., 2018. "A review of child stunting determinants in Indonesia". *Maternal & child nutrition*, 14(4), p.e12617.

³ De Onis, M. dan Branca, F., 2016. "Childhood stunting: a global perspective." *Maternal & child nutrition*, 12:12-26.

⁴ Galasso, E. dan Wagstaff, A., 2019. "The aggregate income losses from childhood stunting and the returns to a nutrition intervention aimed at reducing stunting." *Economics & Human Biology*, 34: 225-238.

⁵ ibid.



Gambar 1. Penyebab *Stunting* dan Penentu Kontekstual (WHO 2013, diolah)

Upaya penurunan angka prevalensi *stunting* (APS) diperkirakan dapat mendorong ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika, sektor ekonomi mereka dapat terungkit melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4% hingga 11%.⁶ Hal tersebut dapat terjadi karena penurunan APS mampu mempengaruhi kualitas dan keterampilan sumber daya manusia, mengurangi biaya kesehatan, serta meningkatkan daya produksi angkatan kerja di masa depan. Oleh karena itu, *World Health Organization* (WHO) telah menjadikan penurunan *stunting* sebagai salah satu dari enam sasaran gizi global untuk mencapai tujuan *zero hunger* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pada tahun 2013, WHO mengembangkan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek yang memiliki peran signifikan dalam menyebabkan *stunting* dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya.⁸ Meskipun kerangka kerja tersebut awalnya didasarkan pada analisis data global, namun penerapannya untuk mengevaluasi penyebab *stunting* pada tingkat entitas negara masih sangat penting dan relevan. Bagan di atas menjabarkan penyebab langsung *stunting* dan penentu kontekstual (penyebab tidak langsung) *stunting* menurut WHO:

Dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang memiliki prevalensi *stunting* tertinggi ketiga diantara negara-negara ASEAN.⁹ Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah Indonesia

⁶ Horton, S. dan Steckel, R.H., 2013. "Malnutrition: global economic losses attributable to malnutrition 1900–2000 and projections to 2050." How Much Have Global Problems Cost the Earth? A Scorecard from 1900 to 2050: 247-272.

⁷ Goal 2: Zero Hunger. Sustainable Development Goals. Tersedia dan dapat diakses pada <https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/>

⁸ Stewart C.P., Iannotti L., Dewey K.G., Michaelsen K.F. & Onyango A.W., 2013." Contextualising complementary feeding in a broader framework for stunting prevention." *Maternal & Child Nutrition* 9: 27-45

⁹ibid.

telah menjadikan *stunting* sebagai isu prioritas nasional, serta menetapkan target penurunan *stunting* pada tahun 2024 menjadi 14% dan melakukan berbagai inisiatif untuk menanggulangi *stunting*.¹⁰ Namun pada tahun 2022, menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, yaitu di angka 21,6%.¹¹ Oleh karena itu, demi mencapai target 14% pada 2024, berarti Indonesia wajib melakukan penurunan 3,8% per tahun dalam dua tahun berturut-turut.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan konvergensi dalam penurunan *stunting* dengan mengintegrasikan di tingkat pusat seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 142/PMK.02/2018 mengamanatkan semua Kementerian dan Lembaga untuk mencantumkan rencana *output* ke dalam beberapa APBN tematik yang berkaitan dengan *stunting*. Dalam proses ini, anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang membantu percepatan penurunan *stunting*, seperti intervensi spesifik, intervensi sensitif, intervensi pendukung, dan kegiatan koordinasi.¹² Penyusunan anggaran harus berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan *money follows program*.¹³

Keterbatasan dalam koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dan sektor pemerintah dapat menjadi hambatan utama dalam upaya konvergensi penurunan *stunting*. Dalam konteks kelembagaan,

upaya konvergensi rawan menghadapi hambatan-hambatan di tingkat implementasi karena masih adanya ego sektoral dan perbedaan pendapat antar lembaga yang menghambat kerja sama. Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci untuk mengentaskan *stunting*, dimulai dengan kesamaan persepsi, komitmen, dan kerja sama yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran.

Peraturan yang jelas dan konsisten adalah instrumen yang sangat penting dalam penanggulangan *stunting*. Selain dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan menetapkan tanggung jawab pemerintah, peraturan yang kuat dapat memberikan pedoman operasional bagi pihak terlibat dalam penanggulangan *stunting*, khususnya yang berada di lapangan. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan yang ada dan meningkatkan konsistensi implementasinya jika berkomitmen untuk menurunkan APS. Revisi peraturan yang lebih komprehensif, mekanisme penegakan regulasi yang tegas, dan sistem pemantauan kebijakan yang terpadu akan sangat membantu mencapai tujuan tersebut.

Pendanaan pemerintah untuk penanganan *stunting* di Indonesia dianggap sudah cukup memadai, tetapi perlu dikelola dengan efisien dan efektif agar dapat menyasar target yang tepat. Studi oleh

¹⁰ Melisa, K., St Aditia Fortuna Pangestu Sitompul, M. dan Rohani, M.N.N., 2022. "The Government Policy for Stunting Countermeasure Strategy in Indonesia be preparing for Golden Generation 2045". Sch Int J Law Crime Justice, 5(12): 554-563.

¹¹ Lubis, K. dan Ramadhanti, I.P., 2023. "Edukasi MP-ASI Dan Makanan Bergizi Sebagai Strategi Pencegahan Stunting." Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2): 1009-1014.

¹² Dokumen Ringkasan Penandaan Rincian Output TA 2022. Tersedia dan dapat diakses pada <https://cegahstunting.id/download/4024/>

¹³ Indonesia's Stunting Challenges, Can It Be Overcome?. Tersedia dan dapat diakses pada <https://observerid.com/indonesia-s-stunting-challenges-can-it-be-overcome/>

World Bank menunjukkan bahwa pendanaan pemerintah Indonesia untuk penanganan stunting sudah cukup memadai, namun efektivitasnya tergantung pada optimalisasi penggunaan sumber daya. Efisiensi dalam penggunaan dana, penentuan prioritas yang tepat, pengelolaan yang baik, dan pemantauan yang ketat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dan keberlanjutan program penanganan stunting.¹⁴

Masalah data yang kurang dapat diandalkan telah berulang kali menjadi kendala dalam merancang strategi yang efektif pada program-program pemerintah. Kurangnya data yang dapat diandalkan tentang populasi sasaran juga turut menyulitkan perancangan intervensi yang efektif untuk mencegah *stunting*. Namun, berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan tim Puslitbangwas, Kota Surabaya telah mengatasi masalah ini dengan integrasi data *real-time* dari berbagai sektor ke dalam aplikasi berbasis *website*. Tanpa mengandalkan aplikasi generik anjuran pemerintah pusat, Surabaya telah berhasil mengembangkan sistemnya sendiri dengan nama Aplikasi Sayang Warga. Sistem berbasis web ini dianggap lebih cepat dan praktikal dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada. Masyarakat dapat memperoleh data kesehatan anak, termasuk gizi, perkembangan fisik, dan informasi ke pelayanan kesehatan secara *real-time*. Dengan data yang mutakhir, petugas kesehatan dapat mengidentifikasi anak-anak berisiko tinggi mengalami *stunting* dan

memberikan intervensi yang tepat. Inovasi *best practice* serupa dapat dieskalasi ke level nasional dan diterapkan ke daerah-daerah dengan dukungan jaringan dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola aplikasi tersebut dan memastikan berlanjutnya infrastruktur teknologi informasi.

Pada level implementasi di lapangan, Tenaga Pendamping Kesehatan (TPK) berperan penting dalam mendukung penanganan *stunting* dengan memantau perkembangan anak, memberikan edukasi, dan memberikan intervensi langsung. Pendekatan *door-to-door* oleh TPK dianggap efektif dan dapat dinormalisasi untuk mendukung keluarga yang berisiko *stunting*. Proporsi jumlah TPK harus sesuai dengan jumlah anak *stunting* yang menjadi sasaran intervensi. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan TPK memiliki kualifikasi yang sesuai dan memberikan layanan yang berkualitas.

Kesimpulannya, penanganan *stunting* di Indonesia memerlukan pendekatan yang berbasis pada konteks lokal. Artinya, setiap daerah mungkin memiliki tantangan yang berbeda dalam mengatasi *stunting*, jadi perlu ada strategi yang disesuaikan dengan keadaan setempat. Selain itu, kerja sama lintas sektoral juga esensial karena masalah ini melibatkan banyak aspek kehidupan manusia. Terakhir, pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah *stunting* dengan upaya preventif juga tak boleh diabaikan. Hal tersebut dapat melibatkan penelitian dan pemantauan untuk memahami penyebab dan dampak *stunting*, serta mengidentifikasi solusi yang paling efektif. Jika upaya penurunan *stunting* tidak berhasil dilaksanakan, maka cita-cita “Generasi Emas” pada tahun 2045 akan pupus.

¹⁴ World Bank. 2020. Spending Better to Reduce Stunting in Indonesia. Finding from a Public Expenditure Review.

Ade Robbani S.

INDONESIA SEHAT: DIPANDU MULAI DARI POSYANDU

ANGGAPAN POSYANDU HANYA SEKADAR TEMPAT MENIMBANG DAN IMUNISASI ANAK USIA BAWAH LIMA TAHUN (BALITA) PERLU DIMINIMALISIR. PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK DATANG KE POSYANDU PERLU DITINGKATKAN KEMBALI, TERLEBIH UNTUK MEMANTAU TUMBUH KEMBANG DALAM MEWASPADA GAGAL TUMBUH ANAK (STUNTING).

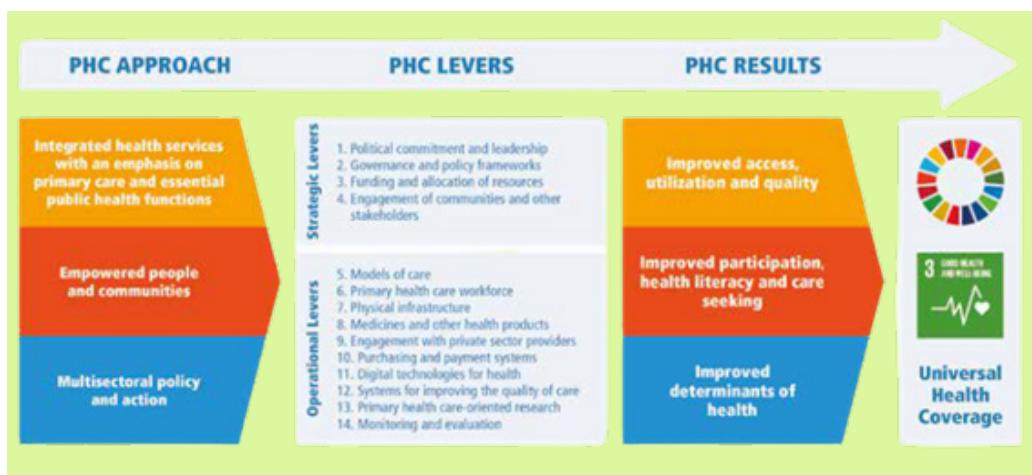
ENAM pilar transformasi kesehatan telah dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dalam revisi Rencana Strategis 2020-2024 sebagai wujud pembelajaran kesehatan dari Pandemi COVID-19.¹ Pilar transformasi kesehatan pertama yang ingin dikuatkan adalah transformasi layanan kesehatan primer. Hal tersebut guna memberikan peningkatan layanan promotif dan preventif kepada masyarakat. Dalam transformasi tersebut, aspek yang lebih akan ditingkatkan adalah kapabilitas dan kapasitas layanan primer yang dilakukan melalui revitalisasi jejaring layanan Puskesmas, Posyandu, dan Kunjungan Rumah. Hal tersebut sejalan dengan Teori Perubahan Pelayanan Kesehatan Primer yang diluncurkan oleh WHO dan UNICEF pada 2020 yang lalu. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan komunitas merupakan salah satu pendekatan penguatan *Primary Health Care* dalam upaya mengungkit peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan primer.

Sebagai wujud transformasi kesehatan primer, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan Kick off Integrasi Layanan Primer (ILP) pada 10 Juni 2022 yang lalu.² Proses integrasi tersebut melibatkan tiga kementerian yaitu: Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Salah satu fokus pelayanan dalam transformasi layanan kesehatan primer tersebut adalah mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Hal tersebut termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi.³ Inisiasi proses integrasi layanan primer tersebut sejalan dengan wujud memberdayakan masyarakat yang membutuhkan kebijakan dan aksi dari multisektor.⁴ Fokus pemberdayaan

tersebut sangat erat kaitannya dengan penguatan struktur kelembagaan masyarakat yang sudah terbentuk di masing-masing desa/dusun yang lebih menjangkau dan mendekat kepada masyarakat, yaitu Posyandu.

Posyandu yang merupakan akronim dari Pos Pelayanan Terpadu adalah suatu bentuk upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal tersebut guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayanan kesehatan dasar di lingkungan terdekatnya. Pencanangan Posyandu pertama kali dicanangkan di Yogyakarta pada tahun 1986 oleh Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kesehatan Nasional. Walaupun dalam sejarahnya, kegiatan posyandu mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1975 dengan dirilisnya kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Posyandu menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan pendekatan *Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breastfeeding, Immunization, Female Education, Family Planning and Food Supplement* atau GOBI-3F.



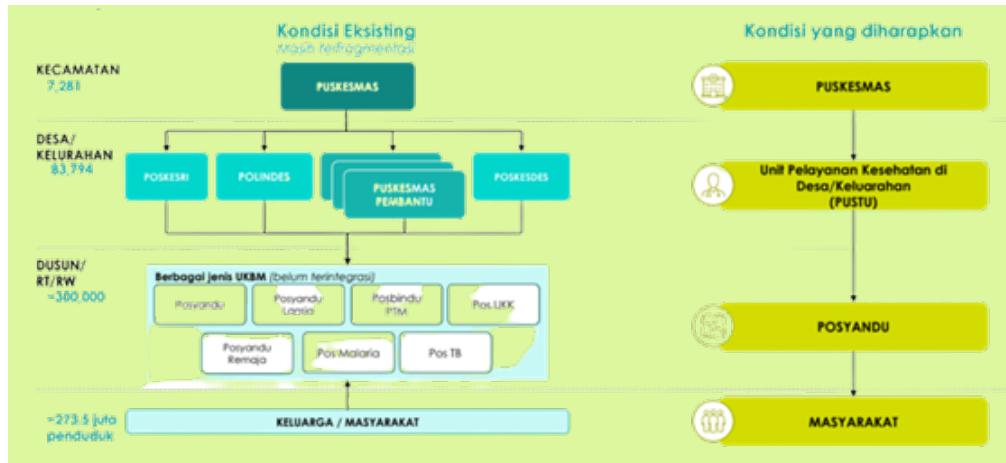
Gambar 1. Teori Perubahan Pelayanan Kesehatan Primer (WHO & UNICEF, 2020)

¹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

²Kemenkes Integrasikan dan Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Primer. Tersedia dan dapat diakses pada <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220610/2440110/kemenkes-integrasikan-dan-revitalisasi-pelayanan-kesehatan-primer/>

³Paparan Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer oleh Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tanggal 1 Maret 2023. Tersedia dan dapat diakses pada <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zvLXq9kQ6A82pqG8bZjgllhaQWO8f3g>

⁴World Health Organization, & UNICEF. 2020. Operational framework for primary health care: transforming vision into action. Geneva: World Health Organization and UNICEF. Tersedia dan dapat diakses pada <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1321790/retrieve>



Gambar 2. Penguatan Struktur Layanan Kesehatan Primer yang Menjangkau Masyarakat
(Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan, 2023)

Secara struktur, Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang berada di bawah naungan desa yang dibentuk melalui musyawarah desa. Penguatan struktur kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam Posyandu untuk memenuhi layanan sosial dasar kesehatan tersebut sejalan dengan Transformasi ILP yang telah dicanangkan oleh Pemerintah pada pertengahan tahun lalu. Pemberian penyuluhan dan pelayanan kesehatan di Posyandu sejalan dengan penguatan kembali pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.

Anggapan posyandu hanya sekadar tempat menimbang dan imunisasi anak usia bawah lima tahun (balita) perlu diminimalisir. Urgensi bahwa Posyandu juga bisa digunakan untuk tempat melakukan skrining/deteksi awal kesehatan perlu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat ke Posyandu. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu perlu ditingkatkan kembali, terlebih untuk memantau tumbuh kembang anak di usia balita tersebut penting

dalam mewaspadai gagal tumbuh anak (*stunting*). Walaupun di beberapa tempat ditemui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Posyandu seperti alat ukur dan timbang balita (antropometri) masih perlu dilengkapi untuk dapat memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan dasar yang cukup.

Di samping kendala sarana dan prasarana, masih ada isu yang belum selesai terkait regulasi dan kelembagaan posyandu prima yang perlu penetapan secara aturan yang jelas dan manajemennya. Secara regulasi Transformasi ILP terutama Posyandu Prima (Posprim) dari yang awalnya serupa Puskesmas Pembantu (Pustu) membutuhkan regulasi yang menaungi. Upaya lain yang perlu didorong adalah regulasi untuk pembiayaan/honor bagi kader kesehatan di Posyandu. Hal tersebut untuk memberikan keleluasaan dan fleksibilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat/daerah pada seluruh tingkatan level hingga desa/kelurahan.

Dari sisi peningkatan kunjungan masyarakat terhadap pelayanan ILP terdapat peningkatan kunjungan masyarakat yang cukup signifikan. Dengan adanya penetapan *piloting*/ujicoba di sembilan lokasi penerapan ILP, baik pada tingkat Posyandu, Posyandu Prima, maupun Puskesmas, kunjungan masyarakat tersebut meningkat yang hanya terdapat tiga dari enam puskesmas yang mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses kesehatan yang lebih mendekat kepada masyarakat dapat meningkatkan jumlah pelayanan baik itu melalui *skrining* pencegahan penyakit tidak menular maupun kunjungan rumah. Hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pola perilaku dan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menyehatkan masyarakat itu sendiri.

Dari hasil observasi lapangan tim Kajian Puslitbangwas BPKP di lokasi *piloting* ujicoba ILP didapati informasi bahwa penerapan ILP yang salah satunya berfokus pada penguatan

peran Posyandu masih membutuhkan pembenahan di berbagai aspek. Pertama, kebijakan yang menaungi penerapan ILP masih belum disusun secara memadai, utamanya Posyandu Prima. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakjelasan pelaksanaan teknis di lapangan. Kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ILP masih perlu dipenuhi. Selain alat ukur antropometri, kecukupan peralatan komputer dan jaringan internet merupakan kondisi yang belum dipenuhi secara ideal di lapangan. Belum lagi ketercukupan pelatihan bagi SDM maupun kader kesehatan yang membutuhkan penguatan dalam pelayanan dan aplikasi (digitalisasi pelaporan) yang relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan. Harapannya di akhir 2023, penerapan ILP secara *mandatory* dapat didukung dengan pembenahan terpadu, baik dari sisi kebijakan maupun sarana dan prasarana. Hal tersebut demi mewujudkan ultimate *outcome* dari upaya pemerintah dalam meningkatkan capaian tujuan pembangunan dengan menjamin kesehatan masyarakat secara nasional. Ayo, sehatkan Indonesia dari Posyandu!



Gambar 3. Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan, 2023)

Ulfaturrrahmah

MENGGALI POTENSI EKONOMI DAN DIPLOMASI KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA

PPANDEMI *Covid-19* lalu melumpuhkan sektor pariwisata Indonesia sehingga pemerintah berupaya untuk memulihkan lagi sektor pariwisata dengan menumbuhkan kepercayaan kembali kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata kembali melalui peningkatan daya saing dan diplomasi pariwisata. Daya saing pariwisata ini merupakan sebuah konsep bahwa suatu destinasi mampu mengelola pengalaman wisata bagi wisatawan untuk kepentingan jangka panjang seperti ketersediaan dan kualitas sumber daya, destinasi wisata, atraksi, jasa, produk, dan kepuasan wisatawan. Salah satu pengukuran daya saing pariwisata pada tingkat internasional *Tourism and Travel Development Index* (TTDI) oleh *World Economic Forum* (WEF) dimana Indonesia berada di peringkat 32 (meningkat dari sebelumnya di posisi 44) dari 117 negara.

Diversifikasi dan spesialisasi destinasi pariwisata ke dalam *health tourism*, *sport tourism*, *religious tourism*, *business tourism*, dan *ecotourism* perlu diperdalam lagi untuk meningkatkan daya saing pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata yang tidak melulu wisata alam namun diperluas lagi dengan atraksi/festival perlu dilakukan untuk menarik wisatawan lebih luas lagi. Pergeseran dan dinamika minat pariwisata dunia tersebut juga dikonfirmasi oleh data WEF, dimana di negara maju (*high-income countries*) mendominasi 95% dari capaian TTDI tertinggi tanpa harus bergantung pada wisata alam atau wisata budaya. Selain itu, pengembangan industri kreatif yang dapat digunakan sebagai promosi dan branding Indonesia melalui seni, ikon/figur/celebrity, dan diaspora Indonesia di luar negeri.

Salah satu contoh yang bisa diangkat mengenai inovasi peningkatan daya saing pariwisata adalah citra pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi yang citranya identik dengan sisi mistis sempat dikenal sebagai Kota Santet akibat peristiwa pembantaian dukun santet pada tahun 1998 silam. Sebuah daerah di ujung timur

pulau jawa yang secara geografis berseberangan dengan Pulau Bali membuat Banyuwangi dianggap sebagai tempat “numpang kencing” sebelum menyeberang ke Gilimanuk - Bali melalui pelabuhan penyeberangan Ketapang. Wisatawan hanya lewat dan tidak berniatan untuk singgah sejenak atau menginap untuk istirahat karena Banyuwangi belum memiliki daya tarik wisata pada saat itu. Pemikiran seperti “nanggung, setengah jam lagi sampai Bali”, benar-benar definisi numpang lewat saja di Banyuwangi.

Kesan masyarakat kepada Banyuwangi ini yang ingin diubah oleh Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi sekaligus sebagai warga asli Banyuwangi sendiri. Sejak menjabat mulai tahun 2010, berbagai upaya dilakukan untuk membentuk citra baik Banyuwangi, bukan lagi Banyuwangi yang diselimuti kisah mistis tapi Banyuwangi yang terkenal akan pesona pariwisatanya, Banyuwangi dengan destinasi yang eksotis. Survei Alvira di tahun 2019 menunjukkan bahwa tujuan utama masyarakat datang ke Banyuwangi untuk berwisata sebesar 96,7%. Usaha bertahun-tahun membuat hasil hingga kini Banyuwangi menjadi destinasi pariwisata. *“The Majestic Banyuwangi”* yang berarti keagungan, kini menjadi branding Banyuwangi di kancah internasional, menggambarkan Banyuwangi sebagai destinasi wisata berkelas internasional dengan menonjolkan keindahan wisata alam dan keanekaragaman budayanya.

Upaya mengubah *image* Banyuwangi dimulai dengan

mengembangkan modal yang sudah ada yaitu sumber daya alam dan budaya lokal. Tidak bisa dipungkiri memang lagi-lagi daya tarik Indonesia terletak pada keindahan akan wisata alamnya. Terbukti sampai saat ini banyak destinasi wisata di Banyuwangi yang sudah mendunia, sebut saja Kawah Ijen dan Pantai Plengkung atau yang lebih dikenal dengan sebutan *G-Land*.

Di sisi lain, santet yang dulunya dikenal dengan melukai seseorang atau memikat hati seseorang dengan ilmu hitam kini lebih diasosiasikan dengan cara yang positif. Santet Banyuwangi yang diartikan dengan memikat hati wisatawan untuk berwisata ke Banyuwangi dengan pesonanya dan bahkan membuat rasa ingin kembali lagi, tidak cukup hanya sekali. Daerah yang dulu disebut sebagai kota santet kini dikenal sebagai sumbernya kota festival. Daerah mana yang bisa menandingi jumlah penyelenggaraan festival di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Festival atau *B-Fest* merupakan ikon atraksi pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dimulai dari tahun 2011 digelar 3 festival yaitu Gandrung Sewu, *Banyuwangi Ethno Carnival*, dan *Banyuwangi Jazz Festival* di hari jadi Kabupaten Banyuwangi dan mendapat antusiasme baik dari masyarakat yang kemudian di tahun 2012 dilanjutkan dengan membuat *calendar of event*. Tahun 2013 sebanyak 15 event digelar, tahun 2014 menjadi 23 event, tahun 2015 menjadi 38 event, hingga tahun 2019 terdapat 99 event dan puncaknya di tahun 2020 disiapkan 123 event namun terhenti karena pandemi. Bahkan di tahun 2021 *B-Fest* terus digelar dengan 102 event.

Pantas saja jika Banyuwangi menyabet penghargaan sebagai Kota Festival terbaik se-Indonesia oleh Kemenparekraf karena keanekaragaman event yang diadakan. Masa

“
Banyuwangi
The Sunrise of Java
Ketika di wilayah
lain belum memulai
aktivitasnya
Banyuwangi sudah
memulai lebih
dahulu

”



pandemi pun giat festival terus diupayakan dengan berbagai penyesuaian, seperti mengusung konsep *hybrid*, mengintegrasikan konsep daring dan luring, menyiarkan di *Youtube* dan media sosial lainnya. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, berbagai event diadakan bekerjasama dengan hotel dengan konsep “*staycation*”, dengan partisipan terbatas, protokol kesehatan yang ketat dan kolaborasi semua pihak menjadikan festival Banyuwangi tetap tumbuh di masa pandemi.

Kesuksesan untuk menghidupkan Banyuwangi sebagai daya tarik wisatawan tentu tak bisa terjadi tanpa kolaborasi yang baik dari semua pihak, baik dari

unsur masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Komitmen pimpinan di sini yaitu Bupati Banyuwangi untuk menghidupkan roda perekonomian Banyuwangi dengan sektor pariwisata ditambah dengan peraturan daerah yang kuat akan *roadmap* pengembangan pariwisata memiliki andil besar dalam perjalannya.

Dari unsur masyarakat, kesadaran akan pembangunan wisata bersama dan mengikuti peraturan yang ada membantu dalam pengembangan wisata Banyuwangi. Dukungan dari pemerintah baik dari segi keuangan melalui pembangunan sarana



prasarana serta fasilitas wisata, relasi pemasaran wisata dalam negeri maupun luar negeri ikut serta membangun wisata Banyuwangi. Ditambah dengan semangat “semua dinas adalah dinas pariwisata” membuat semangat baru untuk menggerakan sektor pariwisata demi menggerakkan perekonomian masyarakat. Tagline semangat Banyuwangi “*The Sunrise of Java*” memiliki filosofi bahwa matahari di Jawa terbit lebih dahulu di Banyuwangi. Ketika di wilayah lain belum memulai aktivitasnya, Banyuwangi sudah memulai lebih dahulu.

Berharap Banyuwangi menjadi yang terdepan dalam berbagai hal termasuk semangat membangun pariwisatanya. Kunci dalam pembangunan pariwisata Banyuwangi adalah **kearifan lokal** dan **diferensiasi**. Banyuwangi telah membuktikan dengan mengangkat kearifan lokal budaya-nya menjadi pembeda bagi destinasi wisata di daerah lain dan bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain. Bukan lagi hanya 3A (amenitas, atraksi, dan aksesibilitas) tetapi menjadi 3AK dengan menambahkan komitmen pimpinan.

Lina Nuryawati

RAKORNAS WASIN: MEMASTIKAN SINERGI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN

Rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) merupakan rapat koordinasi bagi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dikoordinir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina APIP. Bertempat di Kantor Pusat BPKP, Rakornas Wasin Tahun 2023 mengambil tema "Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi".

Mengawali kegiatan, Kepala BPKP menyampaikan laporan kepada Presiden RI. Dalam laporannya, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP dan APIP K/L/D serta tantangan yang dihadapi oleh BPKP dalam melakukan pengawasan. Di akhir laporannya, Kepala BPKP menyampaikan bahwa BPKP dan seluruh jajaran APIP K/L/D berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah dan efektivitas pembangunan.

Beranjak ke acara pembukaan, kegiatan Rakornas Wasin dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo. Presiden pada arahannya menekankan pentingnya peran pengawasan intern. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa peran pengawasan sangat penting dan harus berorientasi pada hasil. Presiden juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif guna mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, Presiden juga menyatakan bahwa pengawasan intern harus ditingkatkan agar setiap program pemerintah terjaga dengan baik.

Dalam arahan berikutnya, Presiden menekankan bahwa pengawasan intern harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, serta risiko-risiko yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pengawasan intern jangan sampai hanya menjadi aksesoris, jangan ada data yang ditutupi dalam rangka pengawasan. Selain itu, seluruh K/L/D diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi pengawasan intern.

Bergeser dari pembukaan, acara Rakornas Wasin dilanjutkan secara *hybrid* dari kantor pusat BPKP dan lokasi narasumber. Sesi arahan diawali oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian menyoroti kebijakan dan strategi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arahan kemudian dilanjutkan oleh Kepala BRIN, L.T. Handoko yang menekankan pada kebijakan inovasi teknologi dan riset terapan dalam mendukung produktivitas dan transformasi ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam paparannya menyampaikan kebijakan dan strategi bidang politik hukum dan keamanan yang mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Wakil Menteri, Afriansyah Noor, memaparkan terkait *reskilling* dan *upscaling* tenaga kerja, serta realokasi tenaga kerja lintas sektoral. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan terkait kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Arahan berikutnya oleh Menteri BUMN yang diwakili Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, menyampaikan terkait peran vital BUMN sebagai *agent of value creator* dan *agent of development*. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah

Azwar Anas, mengawali paparannya yang bertajuk Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak. Arahan ditutup dengan paparan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan yang menyampaikan kebijakan dan strategi peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi serta ekspektasi terhadap APIP.

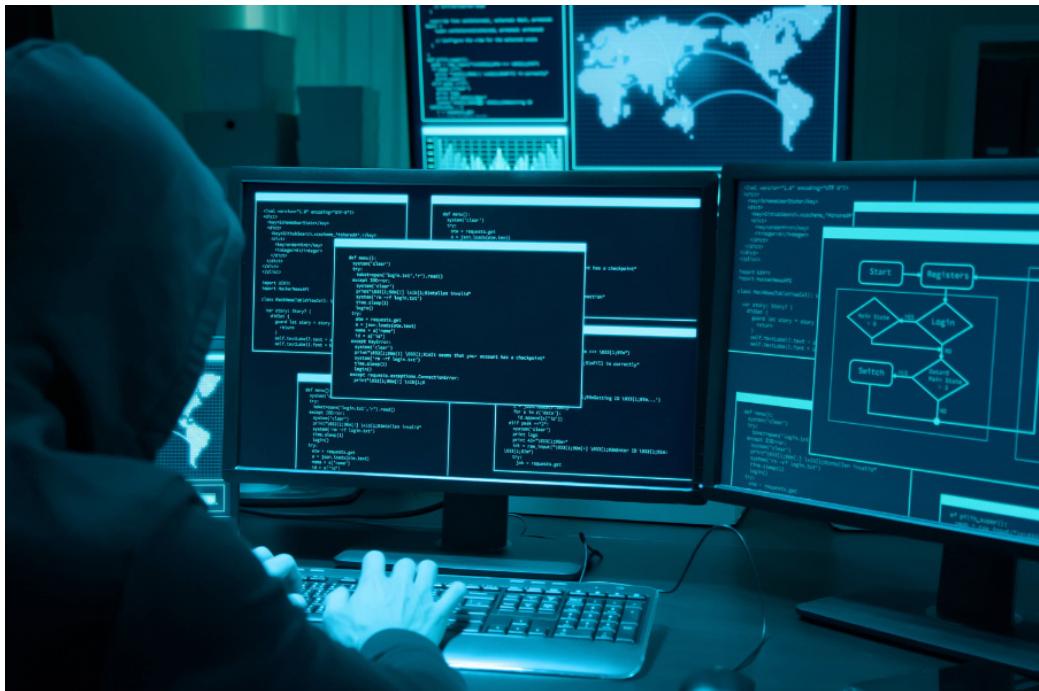
Acara Rakornas Wasin diakhiri dengan penyampaian simpulan oleh Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto. Simpulan Rakornas Wasin memuat poin-poin arah prioritas pengawasan ke depan dalam rangka memperkuat produktivitas nasional yang meliputi efektivitas perencanaan dan penganggaran K/L/D; efektivitas dan efisiensi proses bisnis K/L/D terutama terkait pelayanan perizinan, tata Kelola industri, penguatan investasi, penguatan kualitas tenaga kerja, serta fasilitasi bantuan/stimulus produksi; interoperabilitas dan efektivitas SPBE; percepatan hilirisasi dan revitalisasi industry; penguatan ketahanan pangan nasional; peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan TKDN; efektivitas dan percepatan penyelesaian program pembangunan yang diselenggarakan oleh BUMN; serta penguatan tata Kelola dan akuntabilitas aksi korporasi BUMN.



Nur Asyiah

COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATION: LANGKAH INVESTIGASI KEJAHATAN DIGITAL

KEGIATAN PERETASAN KOMPUTER DAPAT MEMILIKI DAMPAK SERIUS, MULAI DARI PENCURIAN DATA SENSITIF HINGGA GANGGUAN SISTEM YANG MENGGANGGU KEGIATAN OPERASIONAL. INILAH MENGAPA PENTINGNYA PENANGANAN KASUS PERETASAN KOMPUTER MELALUI PENYELIDIKAN FORENSIK.



Dalam era dimana teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan kita, ancaman peretasan komputer telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kegiatan peretasan komputer dapat memiliki dampak serius, mulai dari pencurian data sensitif, manipulasi data, hingga gangguan sistem yang mengganggu kegiatan operasional. Inilah mengapa pentingnya penanganan kasus peretasan komputer melalui penyelidikan forensik sangat diperlukan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dunia *Computer Hacking Forensic Investigation* atau Penyelidikan Forensik Peretasan Komputer.

Definisi Computer Forensic

Computer forensic adalah bagian dari forensik digital yang berurusan dengan kejahatan yang dilakukan melalui perangkat komputasi seperti jaringan, komputer, dan media penyimpanan digital. *Computer hacking forensic* mengacu pada kumpulan prosedur metodologis dan teknik untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menjaga, mengekstrak, menginterpretasikan, mendokumentasikan, dan menyajikan bukti dari peralatan tersebut sedemikian rupa sehingga bukti yang ditemukan dapat diterima selama proses hukum dan/atau administratif di pengadilan.¹

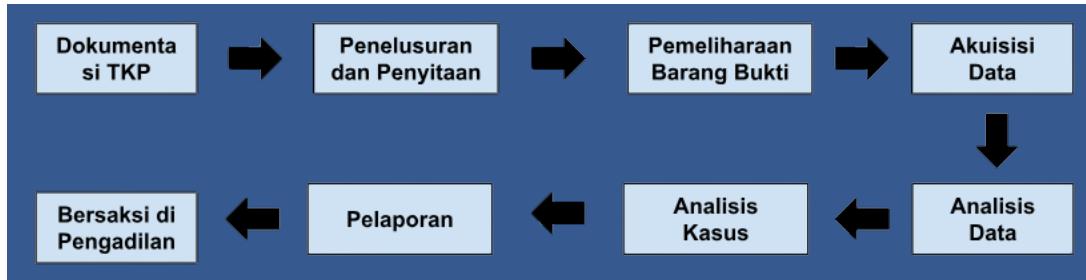
“
Original Evidence Should Never Be Used for Analysis
”

Secara ringkas, *computer forensic* berkaitan dengan proses menemukan bukti yang dapat diterima yang terkait dengan kejahatan siber untuk menemukan pelaku dan menentukan sanksi hukum atas perbuatan tersebut.

Langkah-langkah Penyelidikan Forensik Peretasan Digital

Penting bagi tim *digital hacking forensic* untuk memahami langkah-langkah pengambilan bukti elektronik di Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar proses pengumpulan bukti dapat diterima oleh pengadilan. Kesalahan dalam pengambilan awal barang bukti di TKP berpotensi mengakibatkan kehilangan bukti penting terkait tindak pidana yang sedang ditangani, atau bahkan penolakan bukti elektronik dalam persidangan. Selain itu perlu keahlian khusus yang dibutuhkan dalam menangani bukti elektronik di TKP, mengingat sifat volatil bukti digital yang mudah berubah, hilang, atau rusak. Karena itu, penanganan yang tepat diperlukan untuk menjaga keaslian bukti, mencegah manipulasi bentuk, isi, dan kualitas data digital.

¹ EC-Council, Computer Hacking Forensic Investigator, hal. 19.



Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah terkait otorisasi atau izin dari pihak yang berwenang. Pastikan tim penyidik sudah memiliki surat izin penggeledahan/penyitaan barang bukti. Langkah ini sangatlah penting karena tanpa surat izin, bukti yang kita kumpulkan tidak akan sah secara hukum. Setelah memperoleh izin yang diperlukan, penyidik siap untuk menyelidiki insiden tersebut. Langkah-langkah penyelidikan berikut perlu dilakukan secara sistematis untuk dapat diterimanya bukti di pengadilan.

Langkah proaktif pertama yang memerlukan keahlian *digital forensic* adalah saat proses akuisisi data. Akuisisi data forensik tidak sekadar menyalin *file* dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Namun bagaimana penyidik dapat mengekstrak setiap bit informasi yang ada dalam memori dan penyimpanan sistem korban dengan tetap menjaga integritas data di dalamnya. Salinan ini nantinya yang akan digunakan dalam tahap analisis mengingat aturan pertama dalam *digital forensic* adalah - *Original Evidence Should Never Be Used for Analysis*. Penyidik harus membuat dua salinan, salinan pertama dilakukan untuk analisis dan salinan kedua sebagai *backup* apabila dalam proses analisis mengalami kerusakan.

Secara garis besar terdapat dua teknik dalam melakukan akuisisi data, yaitu *live acquisition* dan *dead acquisition*. Perbedaan mendasar dari kedua teknik ini adalah hanya pada kondisi media penyimpanan dari barang bukti digital saat ditemukan apakah dalam keadaan menyala (*live acquisition*) atau dalam keadaan mati (*dead acquisition*). Pemilihan teknik ini sangat krusial karena penanganan yang tidak tepat dapat membuang petunjuk yang mempermudah penyelidikan.

Tujuan utama dari teknik *live acquisition* adalah untuk mendapatkan data dan *file volatile* dari RAM, seperti informasi tentang *network*, *process*, dan *registry* dari aktivitas komputer. Salah satu *software* yang dapat digunakan untuk meng-*capture volatile* data dalam komputer berbasis Windows adalah Belkasoft Live RAM Capturer. Berbeda hal apabila penyidik berurusan dengan komputer berbasis Linux/Mac.

Ketika media penyimpanan digital dalam keadaan mati, maka penyidik dapat langsung mengamankan/memindahkan harddisk untuk disambungkan ke *forensic workstation*, mengaktifkan *write-blocker*, dan membuat salinan *bit-*

stream/logical image dari *drive/file* dengan menggunakan tools seperti AccessData FTK Imager (*Windows*). Setelah melakukan duplikasi, penyelidik harus memverifikasi integritas salinan dengan membandingkannya dengan asli menggunakan nilai *hash* seperti MD5.

Tahapan selanjutnya yang membutuhkan keahlian khusus adalah analisis data atau melakukan tahap forensik. Tahap ini cukup luas dan kompleks karena tergantung tindak kejahatan digitalnya serta sistem operasi yang akan dianalisis, meliputi:

- *Windows forensics*
- *Linux dan Mac forensics*
- *Network forensics*
- *Web Attacks*
- *Database forensics*
- *Email crimes*
- *Malware forensics*
- *Mobile forensics; dan*
- *Internet of Things (IoT) forensics*

Masing-masing teknik forensik di atas perlu pembahasan tersendiri untuk memahaminya secara utuh. Namun pada prinsipnya setiap kejahatan digital pastinya memiliki jejak yang tersimpan dan digunakan dengan berbagai alat bantu perangkat lunak dalam *digital forensic*. Sebagai contoh dalam *Windows Forensics*, kita dapat melakukan analisis forensik melalui *Windows event logs* yang mencatat setiap aktivitas sistem menggunakan *Windows event logs* terdiri dari tiga kategori utama, yaitu *application log* - *Log* ini menyimpan rincian tentang peristiwa yang berkaitan dengan program-program yang *diinstal* di dalam sistem, *security log* - *log* ini akan menyimpan rincian

tentang peristiwa yang berkaitan dengan keamanan. Rincian yang tersimpan dalam *log* ini mencakup informasi tentang peristiwa seperti percobaan *login* dan mengakses sumber daya, dan *system log* - mencatat peristiwa yang berkaitan dengan berbagai aspek perilaku sistem, termasuk perubahan pada sistem operasi, konfigurasi perangkat keras, serta instalasi *driver*. Oleh karena itu, *log* ini dapat menjadi sumber data yang sangat berguna dalam penyelidikan forensik. Untuk melakukan analisis, penyidik dapat menggunakan aplikasi *open source* bernama *Autopsy* yang dapat membantu penyidik dalam melakukan *Windows Forensics*.

Tantangan Penyelidikan Peretasan Siber

Tantangan yang dihadapi dalam penyelidikan peretasan diantaranya adalah **kompleksitas bukti digital**, dimana bukti digital dapat berupa berbagai format, seperti file, email, log, dan jejak jaringan. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai format data ini diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti dengan benar. **Kecepatan perubahan teknologi** juga mengharuskan penyidik harus selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru untuk memastikan bahwa mereka dapat mengumpulkan dan menganalisis bukti dengan benar.

Selain itu karena serangan siber sangat mungkin terjadi tidak dalam satu negara, maka **kompleksitas hukum** juga menjadi tantangan: Hukum yang mengatur penyelidikan forensik peretasan komputer dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Penyelidik harus memahami hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka dapat mengumpulkan dan menganalisis bukti secara legal.

Adrinal

PROYEK PERUBAHAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

Birokrasi pemerintahan saat ini menghadapi tekanan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan manajerial para pejabatnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapabilitas birokrat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Kepemimpinan). Dalam konteks Diklat Kepemimpinan maka penyusunan proyek perubahan merupakan elemen yang sangat penting.

Proyek perubahan bukan hanya sekadar ide atau gagasan, tetapi merupakan langkah nyata yang diperlukan untuk mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. BPKP mengakui pentingnya hasil dan produk dari setiap Diklat Kepemimpinan yang diadakan. Hal ini membuktikan komitmen untuk terus meningkatkan tata kerja dan sistem di organisasi pemerintah.

Proyek perubahan bukan hanya sekedar penggalian ide, tetapi lebih merupakan wadah untuk menerapkan inovasi. Dalam era global yang dinamis, pemerintah Indonesia harus mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya. Proyek perubahan memungkinkan peserta Diklat Kepemimpinan untuk menganalisis masalah atau peluang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Para peserta diklat diajak untuk menggambarkan seperti apa pelayanan yang ideal yang diberikan kepada *stakeholders* yang menuntut kreativitas dan inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi.

Rancangan Proyek Perubahan

Langkah awal dalam pelaksanaan Proyek perubahan dimulai dengan menyusun rancangan proyek perubahan. Dalam bagian ini peserta berkesempatan untuk merumuskan permasalahan dan batasan-batasan dalam proyek mereka. Dukungan dari pimpinan unit kerja sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan dan pemanfaatan proyek perubahan. Selain itu, keberadaan tim yang terlibat atau biasa disebut tim efektif juga sangat berpengaruh.

Pembentukan tim efektif adalah kunci untuk memulai penyusunan proyek perubahan. Tim ini berkomunikasi secara aktif dipimpin oleh pemilik proyek perubahan dengan pimpinan unit kerja dalam rangka meminta dukungan yang diperlukan. Surat Keputusan pimpinan unit kerja menjadi dasar yang penting dalam mengawal penyusunan, uji coba, dan implementasi proyek perubahan.

BPKP telah menghasilkan banyak proyek perubahan yang memberikan manfaat nyata, seperti *Library Café* dan *e-Top*. Ini adalah contoh nyata bagaimana komitmen dan seriusnya tim efektif dalam menyelesaikan proyek perubahan guna menghasilkan perubahan yang positif di organisasi.

Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan implementasi proyek perubahan adalah membangun jejaring dan kolaborasi. Dalam pandangan membangun jejaring dan kolaborasi, Proyek perubahan bukan hanya aksi individu, tetapi juga representasi dari semangat kebersamaan, komitmen, dan saling percaya antar pihak yang terlibat mulai dari penyusunan hingga implementasi proyek perubahan tersebut. Dengan mengintegrasikan proyek perubahan dalam jejaring kerja yang kuat, organisasi dapat eksis dan berkembang dengan lebih baik, serta mencapai hasil yang sinergis dalam mencapai tujuan bersama.

Melalui proyek perubahan, partisipasi para pihak dapat ditingkatkan. Mereka akan lebih merasa terlibat terhadap organisasi atau program yang sedang dijalankan. Proyek perubahan tidak hanya menghasilkan hasil yang lebih baik, tetapi juga menciptakan kesadaran dan minat yang lebih besar terhadap eksistensi organisasi. Selain itu, proyek perubahan juga berperan dalam meningkatkan mutu dan inovasi sebagai penyelesaian masalah pelayanan publik. Dalam dinamika perubahan dan perkembangan yang cepat, organisasi harus terus berinovasi untuk tetap relevan dengan tuntutan zaman. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak akan membawa perspektif dan ide-ide baru, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.



Analisis Proyek Perubahan

Pustrajakwas BPKP telah melakukan analisis beberapa proyek perubahan, baik terhadap aksi perubahan dari diklat kepemimpinan Pengawas, Administrator, Pejabat Tinggi Pratama, dan mengumpulkan aksi perubahan Pejabat Tinggi Madya. Hal ini menunjukkan bahwa proyek perubahan menjadi bagian integral dari kegiatan Diklat Kepemimpinan dengan menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi institusi.

Proyek perubahan menjadi langkah nyata yang dapat diambil oleh setiap peserta untuk meningkatkan kinerja dalam tugas dan fungsinya. Kemampuan menjadi pemimpin perubahan adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, proyek perubahan harus direalisasikan sebagai langkah penting dalam perubahan positif atas pelayanan publik dan sistem pemerintahan.

BPKP melihat dampak positif dari proyek perubahan dalam meningkatkan kinerja organisasi sebagai bukti nyata bahwa investasi dalam pengembangan kepemimpinan dan inovasi dapat membawa perubahan yang signifikan dalam melayani masyarakat. Penyusunan proyek perubahan diharapkan dapat menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

Beberapa inovasi yang dapat memecahkan permasalahan dalam pengawasan di lapangan di antaranya adalah inovasi Laboratorium Forensik Digital. Inovasi ini merupakan strategi untuk mengoptimalkan peran laboratorium forensik digital BPKP terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP.

Inovasi berikutnya adalah M-PRIMER yang merupakan aplikasi manajemen risiko berbasis digital untuk memantau proses implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan membantu percepatan peningkatan kualitas Manajemen Risiko menuju Level 3.

Inovasi ketiga yaitu instrumen penerapan Mitigasi Risiko Suap pada BUMN dan Badan Lainnya. Instrumen ini sebagai upaya mengatasi *gap* atas belum tersedianya instrumen penerapan manajemen anti penyuapan pada Badan Usaha baik negara maupun daerah, belum adanya rerangka yang menjelaskan manajemen anti penyuapan kaitannya dengan sepuluh atribut *Fraud Control Plan* serta upaya menggerakkan seluruh insan bidang investigasi dalam mengembangkan peran konsultatif penerapan mitigasi risiko suap organisasi.





Inovasi keempat yaitu Implementasi Sistem Pengawasan Berbantuan Drone atau disingkat SISPEMBADOR. SISPEMBADOR digunakan untuk memperbarui prosedur pengawasan dalam melakukan pengujian fisik atau suatu obyek pengawasan, agar dapat menghasilkan informasi dengan lengkap, cepat, tepat, dan akurat yang bermanfaat bagi para *stakeholders* dengan suatu alat bantu yang mengadopsi perkembangan teknologi terkini.

Inovasi selanjutnya ialah penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) melalui Aplikasi Pengawasan Cepat Menggunakan Cara Elektronik (SIPACE MACE). Metode pengawasan penyelenggaran keuangan daerah seperti *assurance* (audit, evaluasi, review, monitoring) dan *consulting* yang sebelumnya masih konvensional/manual beralih ke TABK agar personil dan waktu digunakan secara efisien dan dapat mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Selain itu, juga bisa

mempercepat proses pelaporan dengan akurasi dan validasi data yang lebih baik dibandingkan metode sebelumnya, karena diolah dengan *test of control* dan *substantif test* yang ada dalam TABK.

Sedangkan inovasi terkait dengan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah dilakukan melalui aplikasi SIMAKO. Dengan adanya SIMAKO dapat membantu peningkatan pembinaan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah khususnya organisasi perangkat daerah dalam menerapkan manajemen/pengelolaan risiko.

Inovasi terakhir adalah Penguatan Tata Kelola Aset Desa, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola aset desa yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa. Inovasi ini menghasilkan dokumen *Grand Design* Strategi Pengawalan Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa, Modul Bimbingan dan Konsultansi Pengelolaan Aset Desa, serta *prototype software* inventarisasi aset desa sebagai alat bagi Perwakilan BPKP untuk melakukan pendampingan inventarisasi aset desa.

AM Uswatun Khasanah

KARYA TULIS ILMIAH POPULER: *CALL FOR BOOK CHAPTER MRPN*

UNSUR ILMIAH DAN UNSUR POPULER DIRAMU SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA PEMBACA MENDAPATKAN INFORMASI PENTING TANPA HARUS BERPIKIR KERAS. KARENANYA, KARYA TULIS ILMIAH POPULER SANGAT SESUAI UNTUK PENYEBARAN PENGETAHUAN DAN PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT UMUM.

Dalam rangka memperingati HUT yang ke-40, BPKP menyelenggarakan lomba penulisan karya tulisan ilmiah. Lomba tersebut dibagi menjadi dua yaitu Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Karya Tulis Ilmiah Populer (KTIP). Merujuk pada Term of Reference (ToR) yang ditetapkan oleh panitia, KTI merupakan *Call for Paper* yang ditujukan untuk menggali inovasi terkait kegiatan pengawasan. Sedangkan KTIP merupakan *Call for Book Chapter* yang diharapkan turut menjadi bahan penyusunan buku Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

KTIP merupakan tulisan ilmiah yang mengombinasikan unsur ilmiah dan populer. Biasanya digunakan untuk penyampaian informasi secara menarik agar mudah difahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Unsur ilmiah dan unsur populer diramu sedemikian rupa sehingga pembaca mendapatkan informasi penting tanpa harus berpikir keras. Karenanya, KTIP sangat sesuai untuk penyebaran pengetahuan dan peningkatan literasi masyarakat umum. Contoh KTIP antara lain adalah artikel-artikel populer di majalah, media massa, blog, dan konten edukatif di *platform* digital.

Sebagaimana karya tulis ilmiah pada umumnya, KTIP juga diawali dengan latar belakang permasalahan, rujukan ilmiah pembahasan, ulasan kondisi riil, simpulan dan rekomendasi, dan daftar pustaka. Selain itu, karena KTIP merupakan tulisan ilmiah, maka rujukan ilmiah menjadi keniscayaan. Namun demikian, uraian teorinya tidak mendalam sebagaimana tulisan ilmiah murni yang biasanya ditujukan untuk para akademisi. KTIP ditandai dengan gaya penulisan yang lebih santai, sederhana, mudah dipahami oleh pembaca umum, namun memiliki konten yang jelas untuk disampaikan. Akrab dengan bahasa sehari-hari, informal, sederhana dan jelas, serta dapat dipadu dengan narasi seperti kisah atau anekdot yang relevan dengan topik tulisan.

KTIP mengandung konten yang memiliki relevansi dengan pembaca atau tren yang sedang berlangsung. Kondisi Indonesia yang berada di daerah rawan bencana misalnya, menjadi relevan ketika membuat tulisan populer tentang penanggulangan

bencana. Judul yang dirumuskan maupun ulasan di dalamnya akan menggambarkan relevansi yang kuat. Bagaimana tulisan KTIP tersebut, bisa menjelaskan secara gamblang kondisi belum cukupnya pengelolaan risiko bencana dalam perspektif manajemen risiko penanggulangan bencana.

Pemilihan judul yang menarik dan cocok untuk masyarakat umum, serta adanya contoh dan/atau ilustrasi guna mempermudah pembaca memahami konsep atau ide yang kompleks juga merupakan hal yang lazim. Referensi teknis tidak perlu detail, namun tetap harus dijaga akurasi dan kebenaran informasi yang disajikan sehingga dapat diverifikasi kebenarannya. Penekanan pada simpulan dan rekomendasi perbaikan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. jangan sampai "pesan" menjadi terlewat dan pembaca tidak menangkap pesan dari KTIP tersebut.

Berikut beberapa tips yang dapat diikuti dalam menulis karya tulis ilmiah populer:

1. Menentukan ide dan tema

Merupakan tahapan yang cukup krusial bagi penulis, apalagi bagi penulis pemula. Namun hal ini akan menjadi lebih ringan dengan semakin seringnya membuat tulisan. Untuk tulisan populer, ide bisa digali dari hal-hal populer atau dibutuhkan banyak masyarakat. Semakin serius seseorang ingin menulis, biasanya akan terbawa pemikiran tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Saat sedang berjalan sendirian, merenung, nonton, menunggu jemputan, bahkan tak jarang saat di kamar kecil.

2. Menyusun kerangka tulisan (*outline*)

Outline akan memandu penulis dalam menuangkan ide-idenya, tanpa harus selalu runut. Penulis bisa menuangkan ide-idenya ke dalam bagian-bagian *outline* tanpa harus berpikir berat secara utuh di setiap kesempatan. Penulis tidak harus terpaku dalam urutan yang kaku. Dengan *outline*, penulis mendapatkan navigasi proses penyelesaian tulisan secara lebih ringan dan fleksibel.

3. Mencari referensi

Salah satu kekuatan dari sebuah tulisan adalah kuat atau akuratnya referensi. Penyajian referensi atau literatur dalam KTIP lebih simpel, sederhana, dan ringan.

4. Menambahkan ilustrasi atau tabel/grafik.

Seperti pada uraian sebelumnya, ilustrasi/gambar/tabel/grafik akan memudahkan pembaca mendapatkan pesan tulisan secara lebih santai, dan lebih ringan. Tabel/grafik (sesuai kebutuhan) disajikan secara ringan dan menarik, untuk memudahkan pembaca menangkap pesan tulisan.

5. Membaca ulang keseluruhan artikel

Merupakan tahapan yang penting untuk memastikan bahwa tulisan yang dihasilkan sudah runut, dan tidak ada lagi kata atau kalimat yang tidak "nyambung". Memastikan tiap bagian komponen tulisan sudah menunjukkan keterkaitan, serta mengalir dengan alur yang logis.

6. Menetapkan judul

Judul bisa ditetapkan di awal ataupun di akhir. Penetapan di awal, akan menjadi fokus dalam proses penulisan. Sedangkan jika di akhir, penulis bisa menetapkan judul berdasarkan "rasa" yang diperoleh saat berulang membaca tulisan yang sudah dituntaskan. Namun demikian, ini bukan hal yang krusial, karena pada prakteknya, di akhir proses penulisan pun bisa dilakukan perbaikan atas judul yang sudah ditetapkan di awal.

Adrinal

HIDUP DALAM KEBIJAKSANAAN

Amdi Veri Darma

Kepala Puslitbangwas BPKP

Ketika kita menapaki jejak hidup, segala realitayang hadir patut disyukuri. Semua yang terjadi, bagaimana pun caranya, memberikan pelajaran berharga. Seperti yang terbagi dalam perbincangan kami dengan Amdi Veri Darma, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP beberapa waktu yang lalu. Tiga jam diskusi penuh wawasan tentang kebijaksanaan dalam hidup. Kebijaksanaan yang tak semudah mengedipkan mata. Seperti pohon yang harus memiliki akar kuat untuk menahan hantaman angin agar tak mudah tumbang. Begitupun hidup, penuh liku-liku yang memerlukan kebijaksanaan untuk menghadapinya.

Pengalaman sebagai pejabat eselon II telah dirasakan selama lebih dari 10 tahun. Dalam hal ini, kita dapat belajar banyak dari sosok pembelajar yang hobi membaca. Bagaimana menikmati pekerjaan, terus meningkatkan kompetensi, dan memimpin tim yang memiliki perbedaan dalam hal usia, pengalaman, dan latar belakang. Ada banyak hal menarik yang dapat diambil sebagai pelajaran. Namun, mengulas seluruh perjalanan hidup seorang pria kelahiran Medan, 28 Oktober 1963 ini memerlukan waktu dan upaya khusus.



Menghidupkan Kearifan dalam Kepemimpinan

Seiring berjalannya waktu, pembicaraan kami tentang makna sebenarnya dari kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Tanpa ragu, Amdi berbagi pengalamannya yang kaya selama hampir empat dekade berkiprah di dunia profesional. Bagi Amdi, prinsip-prinsip sederhana membimbing setiap langkahnya. Tetap menjaga hubungan baik dengan staf, kolega, maupun atasan, bekerja secara profesional dan totalitas, serta memberikan yang terbaik adalah inti dari perjalanan karirnya.

Pengalaman yang didapatnya, tak lepas dari prinsip untuk tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari rekan-rekan kerja. Hal ini memungkinkan keseimbangan dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme. Sepanjang karirnya yang panjang, ayah satu putri ini selalu menjunjung tinggi integritas, loyalitas, dan semangat yang tinggi dalam mengembangkan tanggung jawabnya. Bagi Amdi, setiap langkah dalam hidup ini mengandung makna dan hikmah yang patut disyukuri.

Kehidupan yang Sarat Filosofi

Dalam perbincangan kami, terlihat pancaran semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pencinta ilmu, dan suami Anne F. Saragih ini senantiasa rajin membaca berbagai sumber pengetahuan, dari koran hingga media *online*. Kecintaannya pada ilmu membawanya pada komunitas diskusi yang berlokasi dekat kantor dan pengalamannya menjadi dosen di universitas ternama di negeri ini.

Hidup dengan penuh filosofi membawanya dengan mudah menghadapi segala perubahan dan tantangan dengan kepala tegak dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur dan kebijaksanaan. Kepemimpinannya menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan yang tiada taranya.

Amdi memberikan kebebasan bagi rekan-rekan kerjanya untuk berkreasi dan memberikan kontribusi secara maksimal serta mampu menengahi konflik ketika diskusi, dengan bijak. Dan ketika berbeda pendapat, mampu menghargai lawan diskusi dengan memberikan argumentasi yang logis. Tak hanya tugas dan fungsi, tetapi juga keberlanjutan dan masa depan anggota organisasi yang dipimpin menjadi perhatian utama. "Memimpin bukanlah sekadar mengemban tugas teknis. Ia adalah tentang memahami manusia, karakter mereka, dan memimpin dengan bijaksana", ujarnya kala itu.

Pemahaman mendalam bahwa pimpinan tidak hanya bertugas mengarahkan tugas dan fungsi, tetapi juga menjaga aspek-aspek di luar itu. Bagaimana membantu dan memikirkan masa depan tim dan berusaha bersikap adil adalah pesan yang diberikan kepada stafnya. Pemahaman tentang arti kebijaksanaan, berusaha untuk memimpin dengan bijaksana, memberikan arahan yang jelas, dan memberi ruang kreativitas bagi tim.

Mengukir Jejak Hidup Bermakna

Harapan untuk menjalani hidup yang bermanfaat bagi banyak orang, memberikan kontribusi berarti, serta membahagiakan orang-orang terdekat adalah cita-cita yang tidak jarang diimpikan seorang Amdi. Tak sedikit waktu yang telah dihabiskan untuk menjalani karir yang kaya pengalaman selama hampir 39 tahun dengan berbagai tugas dan penugasan yang dijalani. Dua jabatan terakhir yang diemban dianggap sebagai warisan besar bagi institusi ini. Menjabat sebagai Kepala Biro



MKOT, pejabat yang suka olahraga catur ini menghadapi tantangan besar dalam mengawal reformasi birokrasi, mengatur tata laksana organisasi, dan merencanakan perubahan dalam organisasi. Jabatan yang sangat luas, melibatkan koordinasi berbagai unit kerja dan instansi lain termasuk Perwakilan BPKP. Sebuah tanggung jawab yang tidak ringan.

Saat memimpin Puslitbangwas, Amdi selalu berusaha tenang dan tidak pernah marah. Di rapat, pendapat semua staf selalu dihargai. Keseimbangan dan pemahaman yang dimiliki oleh Amdi sangat kentara. "Memimpin di masa seperti sekarang ini tidaklah mudah. Selain kompetensi yang diperlukan, kemampuan mengelola emosi menjadi hal yang tak terpisahkan", ujarnya kala itu.

Hidup yang bermanfaat bukan hanya tentang pencapaian dan prestasi, tetapi juga tentang bagaimana kita mempengaruhi dan mendukung orang-orang di sekitar

kita. Memberikan contoh nyata tentang bagaimana memimpin dengan bijaksana, tetap tenang dalam menghadapi dinamika, dan memberikan dukungan kepada orang lain. Amdi selain seorang pimpinan, tetapi juga seorang mentor dan *inspirator*. Jejak hidupnya akan terus memberikan dampak positif, tak hanya di BPKP, tetapi juga di kehidupan banyak orang yang pernah berinteraksi dengannya.

Merah Gelar Master dan Mengukir Jejak Karir yang Bermakna

Pada tahun 1993, setelah meraih gelar *Master of Accountancy*, Amdi memutuskan untuk berkomitmen sebagai seorang profesional dalam bidang audit internal. Langkah ini tidaklah ringan, karena ia berjalan di jalur yang mengarahkan dirinya pada tugas pengawasan internal pemerintah di BPKP, yang secara langsung melapor kepada Presiden. Penugasan ini merupakan tekad yang kokoh dan membangun fondasi karirnya sebagai auditor internal.

Keinginan Amdi tumbuh besar untuk menjadi seorang pimpinan tinggi yang memiliki otoritas untuk mengarahkan masa

“**Memimpin bukanlah sekadar mengemban tugas teknis. Ia adalah tentang memahami manusia, karakter mereka, dan memimpin dengan bijaksana**”

Amdi Veri Darma

depan pengawasan internal. Memastikan bahwa hasil pengawasan memiliki nilai tambah bagi organisasi dan membantu pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang berharga.

Attitude (sikap), *Skill* (keterampilan), dan *Knowledge* (pengetahuan) adalah tiga faktor penting dalam perjalanan karir Amdi. Sikap untuk senantiasa mengedepankan etika dan pemikiran terbuka menjadi pedoman dalam tindakan dan berperilaku. Amdi selalu melihat masa depan dengan perubahan dan perbaikan sebagai hal yang mungkin. Saat ditanyakan terkait kepemimpinan yang sudah dilakoninya, Amdi berharap menjadi pemimpin yang inspiratif yang memiliki wawasan yang luas. Mampu mengantisipasi situasi dan berfokus pada membangun dan menjaga hubungan yang baik. Senantiasa menginspirasi orang lain dengan terus belajar, berbagi ilmu, membimbing, serta membangun kerjasama tim.

Sebagai komunikator yang dinamis, Amdi belajar untuk mendengar dengan sabar dan tidak mudah menghakimi. Ia belajar berbicara dengan gaya yang lebih lembut daripada keras. Tugas-tugas penasihatannya telah membuktikan pentingnya berbicara dengan cara yang membangun, terutama ketika membicarakan perbaikan sistem dan penerapan tindakan pengendalian. Kemampuan berpikir kritis, memahami permasalahan secara cepat dalam diskusi

terkait kajian dan menggali referensi yang tepat dari jurnal secara cepat merupakan nilai lebih yang memberikan manfaat bagi tim.

Dalam hal pengetahuan teknis, Amdi terus meningkatkan keahliannya. Dalam perjalanan karirnya, ia semakin terlibat dalam pengelolaan risiko, manajemen risiko, dan analisis makro. Amdi belajar melalui berbagai media, termasuk sertifikasi dan ujian, yang meningkatkan kompetensinya. Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*, *Control Self Assessment*, dan *Certified Risk Management Professional* memberikan pengayaan besar pada kemampuannya. Mantan Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP ini juga pernah mengikuti sertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) meski ada satu mata uji yang belum tuntas.

Amdi sadar bahwa banyak hal yang perlu dia pelajari. Dalam dunia yang cepat berubah, ia terus mencari ilmu baru melalui berbagai sumber. Mulai dari berlangganan koran, membaca jurnal ilmiah, bergabung dalam kelompok diskusi, hingga mencari pengetahuan melalui internet. Tidak heran dengan kemampuan sastranya yang tinggi, terkadang sulit dipahami pembaca karena penggunaan bahasa yang tidak lazim.

Dalam perjalanan panjangnya, Amdi terus berusaha menjadi individu yang berkembang, mengasah keterampilan, dan mendapatkan pengetahuan baru. Kesungguhan ini membangun fondasi kuat dalam karirnya yang panjang dan bermakna. Dalam pandangannya, untuk mencapai puncak karir yang bermakna, mengedepankan sikap, keterampilan, dan pengetahuan adalah kunci untuk meraih tujuan.

Menemukan Harmoni dalam Tantangan

Kecintaannya pada pengetahuan ditunjukkan dengan dukungan yang besar terhadap upaya membangun sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*). Klasifikasi pengetahuan di KMS BPKP adalah salah satu sumbangsihnya. Amdi memberi inspirasi bagi mereka yang ingin terus mengejar ilmu dan mengasah kompetensi terkini di bidang pengawasan internal. Prinsip-prinsip hidupnya juga menjadi panduan dalam menjalani pekerjaan, dimana tiada alasan untuk mengeluh, kecewa, sedih, atau marah jika situasi dan kondisi dapat dimengerti. Jika tidak dimengerti, maka yang terpenting adalah memberikan pengertian dan kemungkinan memaafkan.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Amdi membagi pendekatan dalam tiga tahap. Pertama, ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang tugas dan metodenya. Kedua, ia memahami potensi risiko terburuk yang mungkin terjadi, mengakui adanya hukum Murphy ("Apapun yang bisa salah, akan salah"). Ketiga, ia memantau pekerjaan dan terlibat jika risiko teridentifikasi.

Prinsip ini memungkinkan Amdi untuk menetapkan target yang realistik dan mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kendala yang tak terduga muncul, ia menghadapinya dengan pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki potensi kesalahan yang tak terduga, bukanlah kesalahan individu yang perlu disalahkan.

Terkait kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan prinsip ini, waktu menjadi tantangan utama. Memahami tugas, metode kerja, dan

lingkungan pekerjaan memerlukan waktu. Pemantauan yang efektif juga memakan waktu, ujarnya kala itu.

Meski demikian, semangat Amdi untuk membagiakan orang di sekitarnya tetap kuat. Untuk menjaga kebahagiaan pribadi, ia terhubung dengan dunia sekitarnya. Berusaha untuk selalu terhubung dengan orang lain, mengikuti alur hidup alam semesta, dan berserah diri pada Tuhan dan alam, memberikan Amdi koordinat dalam dinamika hidup yang luas.

Dalam pandangannya, setiap aspek hidup memiliki nilai yang sama, dari peristiwa besar hingga peristiwa kecil. Bagi Amdi, kebahagiaan datang dari koneksi dengan semua hal di sekitarnya, dari bintang-bintang yang berputar di langit hingga aroma bunga mawar. Penyuka tanaman ini menghadapi dinamika hidup dengan senyuman, dari tuntutan pekerjaan hingga suara cekcok tetangga.

BPKP mungkin akan kehilangan salah satu putra terbaiknya, yang tak hanya bekerja dengan integritas dan loyalitas, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam mencari ilmu. Hidupnya penuh dengan karya dan prestasi di setiap unit kerja yang dipimpinnya, sejalan dengan karirnya yang menarik untuk dicermati. Kisah Amdi menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, menghadapi tantangan dengan pemahaman dan keterlibatan, serta tetap terkoneksi dengan alam semesta dan nilai-nilai dalam kehidupan. Prinsip hidupnya yang sederhana dan bijaksana mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, yang perlu dihayati dan diapresiasi dalam setiap langkahnya. *C'est la vie.*

Semoga mendapatkan kebahagiaan sejati di akhir pengabdian ya Pak...

Nugroho DP

Dorong Peran Serta, Puslitbangwas Bekali Duta KM Materi Pengelolaan Pengetahuan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP menyelenggarakan forum pembekalan kepada 69 orang Duta Knowledge Management (Duta KM) yang berasal dari unit-unit kerja BPKP di seluruh Indonesia.

Forum yang berlangsung selama tiga hari ini, dihadiri secara daring oleh Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto, dan secara luring oleh Kepala Puslitbangwas BPKP Amdi Veri Darma, Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Tukirin, serta narasumber dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) dan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). "Kami jadi berpikir bagaimana cara mengelola KMS, maka pada forum ini kami hadirkan expertise dari DDTC dan UTY," ujar Amdi.

Dikatakan Amdi, masih adanya pelabelan bahwa KMS di BPKP milik Puslitbangwas semata, memerlukan peran aktif Duta KM di tiap unit kerja dalam menciptakan dan berbagi pengetahuan. "Informasi bisa dari mana saja, dari dalam maupun luar, oleh karenanya KMS BPKP harus terinternalisasi ke semua unit kerja," pungkas Amdi.

Amdi berharap, melalui forum ini, para Duta KM yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Utama BPKP, dapat membantu mewujudkan BPKP yang dituntut untuk lebih bekerja berdasarkan pengetahuan.





Library Café Hadirkan Staf Khusus Menteri PUPR Sharing tentang Fraud PBJ

Topik *Library Café* kali ini menyikapi akan pentingnya manajemen risiko terutama risiko *fraud*. Berdasarkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), risiko *fraud* terbesar terjadi pada saat penganggaran dan pengadaan.

Hal ini mengemuka dalam *Sharing Session Library Café* bertajuk "Deteksi dan Mitigasi Risiko Fraud PBJ: Sharing Experiences Best Practices di Kementerian PUPR." Hadir Binsar H. Simanjuntak sebagai staf khusus Menteri PUPR yang membagikan pengalamannya

dalam memitigasi risiko khususnya pengadaan di Kementerian PUPR.

"Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa *Fraud PBJ is my risk appetite*," jelas Binsar. PBJ merupakan suatu hal yang strategis untuk menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR. Berdasarkan arahan Menteri kepada seluruh jajarannya, bahwa setiap unit kerja wajib menyusun dan menerapkan CRA (*Corruption Risk Assesment*) dalam proses bisnisnya.



Jaga Keunggulan Kompetitif, Puslitbangwas Berkolaborasi Bangun KM Architecture

Bekerja sama dengan Brainmatics Indonesia Cendekia (*IT Training & Certifications*), Puslitbangwas BPKP selenggarakan *Workshop Knowledge Management Architecture* yang diikuti oleh peserta dari Puslitbangwas BPKP, Pusinfowas BPKP, dan Pusbin JFA.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, didasari atas adanya kebutuhan organisasi untuk mengelola pengetahuan anggotanya atau dalam hal ini para pegawai BPKP.

CEO BrainCorp Romi Satrio Wahono menyebut saat ini pengetahuan adalah satu-satunya kunci keunggulan kompetitif. "Sehingga sangat penting bagi BPKP untuk secara konsisten menghasilkan pengetahuan baru, menyebarluaskan ke dalam organisasi, dan mengimplementasikannya."

Workshop yang didanai oleh ADB melalui program STAR ini merupakan pelatihan yang diinisiasi oleh Bidang Pengembangan dan Inovasi Pengawasan, Puslitbangwas BPKP.

Dorong Keberlanjutan Inovasi, 7 Inovasi Pelayanan Publik BPKP Ikut Ajang KIPP 2023

Pemerintah telah mencanangkan lima prioritas kerja tahun 2019-2024 yang mencakup pembangunan SDM dan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu prioritas tersebut adalah penyederhanaan birokrasi pada berbagai sektor pemerintahan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan, serta membuka peluang inovasi sebagai salah satu syarat agar pemerintahan bisa cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Puslitbangwas sebagai unit kerja yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan mengelola inovasi di BPKP, melakukan serangkaian

kegiatan terkait keikutsertaan BPKP dalam gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang rutin diadakan tiap tahun oleh Kementerian PANRB. Kegiatan dimulai dari tahapan sosialisasi dan publikasi ke seluruh unit kerja di BPKP, kemudian menyeleksi proposal-proposal inovasi yang telah masuk, dan diakhiri dengan mengirim proposal yang memenuhi syarat ke Panitia Seleksi KIPP.

Subkoordinator Pengembangan, Inovasi, dan Manajemen Pengetahuan BPKP, M. Tasya Renaldo menyampaikan terdapat 7 proposal inovasi yang berasal dari beberapa unit kerja baik Pusat maupun Perwakilan BPKP, yang berhasil *submit* ke Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). "Dengan ikut serta dalam kompetisi ini selain mengharap penghargaan, sekaligus sebagai sarana dalam memacu unit-unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan," pungkasnya.

Nugroho DP

KAMUS ISTILAH PENGAWASAN

Sering orang mengatakan satu kata berjuta makna, sebuah pepatah yang dirasa relevan mewakili Kamus Istilah Pengawasan ini. Satu kata dapat diterjemahkan menjadi beragam makna sesuai konteks di mana kata itu digunakan.

Dalam banyak kasus, orang gagal memahami makna karena salah konteks. Sebagai contoh, kata material, dalam konteks bangunan diartikan sebagai bahan bangunan, seperti pasir, semen, dan sebagainya.

Beda lagi ketika material dibawa ke dalam konteks pengawasan intern, yang diartikan sama dengan signifikan. Sekali lagi, memaknai satu kata harus disesuaikan dengan konteks di mana kata itu digunakan.

Secara eksplisit, konteks yang digunakan dalam kamus ini adalah konteks pengawasan intern, bukan konteks yang lain, sehingga sangat mungkin terhadap satu kata yang sama, memiliki makna berbeda ketika dibawa dalam konteks yang lain.

Sebagaimana harapan atas adanya kamus ini, maka beberapa istilah yang tersaji pada ulasan berikut, sekiranya mampu memberikan panduan kepada pengguna agar lebih tepat memaknai setiap kata yang sering dipakai dalam dunia pengawasan intern.



Koordinasi

Suatu proses integrasi baik atas sumber daya yang dimiliki unit/organisasi maupun proses manajemen yang mengarahkan, mengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan sehingga terdapat sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai tujuan kegiatan secara efisien dan efektif.

Pembinaan

Suatu proses perubahan atau pembaharuan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya yang terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, kecakapan melalui pengarahan dan pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Informasi

Data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.



Komunikasi

Proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Independensi

Kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas pengawasan intern untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern secara objektif.

Kode Etik

Pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan intern.

Konflik Kepentingan

Kondisi yang dialami auditor dalam posisi yang dipercaya memiliki persaingan profesional atau kepentingan pribadi yang dapat menyulitkan dalam memenuhi tugas tanpa memihak.

Objektivitas

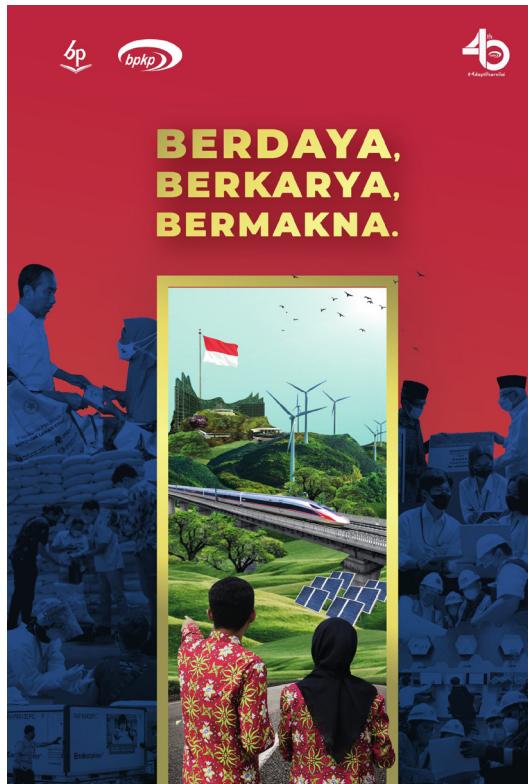
Sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.

Pengendalian

Tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Manajemen Risiko

Aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya.



Judul:
BERDAYA, BERKARYA,
BERMAKNA.

Penulis:
Dwi Kiswanto, dkk.

Penerbit:
Balai Pustaka

Tahun Terbit:
Cetakan Pertama, 2023

Tebal:
156 halaman

Peresensi:
Adrinal

BERDAYA, BERKARYA, BERMAKNA KIPRAH BPKP TERUS RELEVAN MELINTASI ZAMAN

BPKP awalnya bernama Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang kemudian menjadi Lembaga Non Kementerian untuk meningkatkan independensi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Di pengantar buku ini dipaparkan perjalanan BPKP selama empat dekade dengan segala dinamika dan pasang surut perannya sebagai lembaga pengawasan intern sekaligus sebagai auditor Presiden. Selama empat dekade tersebut, BPKP tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan, dan sekaligus adaptif terhadap segala dinamika politik serta sosial-ekonomi yang berkembang. Terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, ketika masa krisis pandemi COVID-19 dan dampak turunannya telah memaksa BPKP untuk terus inovatif dan berperan strategis dalam mengawal program pemerintah dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis untuk memastikan kebermanfaatan program pemerintah kepada masyarakat luas.

Kehadiran buku ini bukan sekedar saksi sejarah atau tinjauan masa lalu atas lahir dan tumbuhnya BPKP sebagai lembaga pengawasan intern. Buku ini juga menggambarkan

semangat tanpa mengenal lelah untuk terus bertransformasi. BPKP berkomitmen akan terus berperan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam buku ini dipaparkan terkait konvergensi dan kolaborasi karena berpikir secara silo tidak lagi relevan dalam konteks pengawasan intern yang multidimensional.

Buku Berdaya, Berkarya, Bermakna ini terdiri dari 4 bagian utama. Bagian pertama mengupas awal mula terbentuknya BPKP sebagai organisasi pengawasan intern, dengan segala upaya untuk mempertahankan eksistensi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan yang beragam.

Sejak awal terbentuk peran BPKP tidak pernah berubah: mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, hanya konteks dan fokusnya yang berbeda. Prinsip dan komitmen ini yang kemudian menjadi pondasi pengembangan dan aktualisasi peran dan fungsi BPKP, seiring dengan perubahan perspektif pengawasan intern serta visi dan misi yang berganti karena adanya transisi kepemimpinan BPKP. Agilitas dan aktualisasi peran BPKP juga disajikan dalam beberapa contoh keikutsertaan BPKP dalam pengawalan program strategis pemerintah, misalnya pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional,

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN), bahkan divestasi saham PT Freeport Indonesia serta akuntabilitas Asian Games Tahun 2018.

Bagian kedua fokus menjelaskan transformasi organisasi BPKP dalam perspektif kepemimpinan terbaru. Kepemimpinan yang baru membawa visi dan misi yang reformatif, dan proses tersebut bertepatan dengan merebaknya pandemi COVID-19 atau yang diasosiasikan sebagai krisis/disrupsi. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh pada strategi operasional pengawasan intern BPKP. Beberapa perubahan yang dilakukan memiliki implikasi baik secara internal maupun eksternal, dan ini merupakan hal yang tidak terhindarkan seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan BPKP. Keseluruhan narasi pada bagian ini merupakan perwujudan kesiapan BPKP dalam menjalani transisi peran auditor intern dari sebelumnya GRC *strategic partner* menjadi *trusted advisor* pemerintah.

Bagian ketiga akan menjelaskan berbagai pengalaman, pelajaran, dan capaian hasil pengawasan BPKP yang paling kontekstual dalam era multi disruptif pandemi, serta bagaimana Presiden dan pemangku kepentingan lainnya memanfaatkan rekomendasi kebijakan strategis BPKP. Konteks pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang dilakukan BPKP banyak berfokus pada tiga sektor utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi karena tiga sektor ini menjadi tumpuan keberlangsungan dan hajat hidup masyarakat luas. Meskipun demikian, dalam pengawalan akuntabilitas di periode ini, BPKP juga tetap melakukan pengawasan atas beberapa kebijakan atau program

strategis pemerintah lainnya, seperti misalnya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Pada bagian keempat, narasi akan membahas tentang kondisi saat ini yang menjadi pijakan atau titik tolak untuk formulasi peran pengawasan intern BPKP di masa depan, dalam mengawal penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta meraih impian Indonesia Emas di 2045. Relevansi pengawalan pembangunan di masa depan dimulai dengan menjelaskan target visioner Indonesia 2045 yang terdiri dari sasaran 4 pilar utama. Dari sasaran pembangunan tersebut, kemudian ditegaskan visi pengawasan intern BPKP dan ambisinya untuk memenuhi peran *value driver* dalam konteks pengawasan intern. Selanjutnya pemikiran visi tersebut diagregasi menjadi otoritas pengawasan, mengidentifikasi risiko pembangunan nasional jangka panjang, serta membangun rumusan normatif pengawasan intern yang relevan dalam konteks pengawalan sasaran Indonesia Emas 2045.

Buku ini diterbitkan sebagai upaya mengemas dan menyebarluaskan pembelajaran atas proses transformasi kelembagaan BPKP sebagai auditor Presiden. Transformasi dan segala atributnya yang kompleks adalah cerminan dari organisasi yang terus berubah serta terus berubah untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang adaptif dan dinamis. Dalam narasi buku ini, konsep agilitas juga digunakan sebagai refleksi atas proses transformasi BPKP dalam konteks *milestone* auditor intern. Peran BPKP dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan

diungkapkan sebagai sebuah perjalanan panjang, dengan pasang-surut pembuktian kepercayaan kepada mitra dan pemangku kepentingan. Setidaknya proses dan sejarah itu yang terkompilasi menjadi memoar pengawasan dari awal berdiri di tahun 1983 hingga sekarang.

BPKP kian memantapkan reputasi dan perannya dalam struktur kelembagaan eksekutif pemerintahan.

Kontribusi dan sumbangsih nyata BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan terus bergerak progresif, sejalan dengan ekspektasi pemangku kepentingan yang terus meningkat pesat. Dari satu momentum ke momentum yang lain. Dari satu era ke era yang berbeda. Dari kondisi normal dan harmonis ke kondisi krisis dan disruptif. Buku ini menjadi bukti untuk memperlihatkan bahwa keberadaan dan peran BPKP terus relevan melintasi zaman.





Rury Hanasri

EXPLORING CHATGPT DAN KEKHAWATIRAN ETIS

ChatGPT saat ini sudah menjadi isu utama dalam keseharian kita, layaknya Google masa lalu yang menjadi rujukan pertanyaan kita sehari-hari. Kehadiran aplikasi ini menyedot perhatian pengguna karena sangat interaktif dan membantu pengguna untuk mengeksplorasi masalah tertentu. ChatGPT merupakan teknologi *chatbot* yang menurut majalah investopedia, yaitu program komputer yang melakukan simulasi percakapan manusia dengan perintah teks. *Chatbot* sebenarnya telah muncul mulai tahun 1992 meskipun sebenarnya program serupa telah diluncurkan pada tahun 1960 oleh profesor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Joseph Weizenbaum dan disebut sebagai ELIZA yang berperan sebagai terapis yang dapat berempati. *Chatbot* dikembangkan untuk menggantikan layanan pelanggan selama 24 jam nonstop dengan menggantikan peran manusia melalui kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent/AI*).

ChatGPT atau *Chat Generative Pre-Trained Transformer*, diluncurkan pada November 2022 adalah *chatbot* kecerdasan buatan yang sangat terkenal dan dikembangkan oleh OpenAI. Teknologi ini telah mampu menyedot perhatian satu juta pengguna di pekan peluncurannya serta 100 juta pengguna dalam dua bulan pertama (tempo.co). Maka Google memberi “kode merah” yang memulai kompetisi baru dalam mesin pencarian. Kecerdasan yang diperoleh dari pembelajaran banyak informasi dari internet, media sosial, website, buku, jurnal dan sumber pengetahuan lainnya telah mampu

menghasilkan respon melalui pola cepat dari pertanyaan yang diberikan serta koreksinya terhadap *feedback* negatif. Maka banyak media menyatakan bahwa beberapa profesi yang terancam karena adanya ChatGPT diantaranya adalah penulis, pengajar, dan analisis keuangan. Di pertengahan tahun 2023, CEO OpenAI sekaligus pencipta ChatGPT yaitu Sam Altman berkunjung ke Indonesia atas undangan sebuah perusahaan. Ketika ditanya oleh Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Indonesia terkait masa depan pendidikan, Altman menyampaikan bahwa ChatGPT bukan revolusi pertama dalam dunia pendidikan, namun iterasi yang kesekian kali. Dan pendidikan harus berubah, dan disitulah peran AI akan meningkatkan kreativitas siswa dengan pembelajaran yang mendalam (cncbindonesia.com).

Layanan ChatGPT dihasilkan dari pembelajaran terhadap data dan informasi yang besar dari berbagai sumber sehingga menghasilkan pola akurat bukan data akurat (Wahono, 2023). Beberapa kelebihan lain dari ChatGPT adalah menolak pertanyaan kriminal, tidak memberikan masukan terhadap fatwa dan kemampuan mengingat atau memberikan *feedback* kepada pertanyaan pengguna. Maka ChatGPT memanjakan *user* dengan interaksi yang lancar tanpa gangguan. Layaknya seorang yang mengajak teman diskusi, menggali ide baru, menanyakan dan menjelaskan secara detail, maka aplikasi ini menjadi rujukan dalam era perubahan yang cepat. Namun, di balik kehebatannya sebagai sebuah produk, maka tidak lepas dari kelemahan.

Menurut Wahono (2023) di antara kelemahannya adalah:

1. Dapat menghasilkan informasi yang tidak benar. Kadang menulis jawaban yang kelihatannya benar tetapi ternyata salah atau tidak masuk akal atau disebut dengan AI halusinasi.
2. Data pelatihan mempunyai bias algoritma ketika menanyakan deskripsi. Karena yang dikejar adalah akurasi pola bukan akurasi data, sehingga jika informasi banyak maka bisa jawab, namun jika menanyakan spesifik dan tidak banyak informasi, maka jawabannya tidak akurat.
3. ChatGPT menyatakan bahwa data dan informasi yang menjadi dasar dalam menjawab *user* adalah sampai bulan September 2021, untuk membatasi bahwa ruang lingkup/waktu dapat mempengaruhi pola data dan subyek perubahan.

Dilema Ethis

Kontroversi terkait keberadaan ChatGPT telah dilontarkan oleh beberapa kalangan seperti para ahli AI sendiri, akademisi, dan peneliti melalui reviu kritis yang disampaikan serta implikasi legalnya. Banyaknya *data training* yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tanpa mencantumkan sumber referensi maupun kredit pada pemiliknya, membuat ChatGPT dipertanyakan atas hak cipta dari informasi yang diberikan.

Kekhawatiran etis lainnya adalah plagiarisme, yakni masalah yang sering ditudingkan pada program ini. Ketika dengan mudah, pengguna dapat mengambil informasi dalam chat dengan lengkap dan detail tanpa mengutip nama pemiliknya. Meskipun ada AI yang dikembangkan dengan tujuan semata-mata untuk mendeteksi konten yang ditulis AI. Alat-alat ini tidak 100% akurat dan sering kali menghasilkan kesalahan positif jika kontennya ditulis oleh manusia.

Cara Menggunakan ChatGPT Secara Etis

Jika digunakan dengan benar, ChatGPT dan alat penulisan AI lainnya dapat menjadi sumber daya yang sangat berguna untuk meningkatkan keterampilan menulis akademis dan mengeksplorasi tentang suatu hal. Kemampuannya mampu membantu dan mempercepat pelaksanaan tugas seperti halnya mentor yang membimbing dan mampu menjawab keraguan di kepala kita atas jawabannya yang kita pertanyakan kembali. Kiat-kiat berikut dapat membantu Anda menggunakan ChatGPT secara etis:

1. Mengikuti panduan institusi atau organisasi terkait penggunaan ChatGPT. Seandainya tidak ada regulasi terkait itu, maka pergunakan dengan cara yang bermoral.
2. Akui penggunaan ChatGPT serta bagaimana penggunaannya dengan mengutip ChatGPT atau memberikan tautan ke percakapan.
3. Evaluasi keluaran secara kritis. Verifikasi informasi yang dikeluarkan oleh ChatGPT menggunakan sumber yang dapat dipercaya atau menyalin dan menanyakan ke mesin pencari lain terkait referensinya.
4. Menggunakannya sebagai sumber inspirasi. ChatGPT dapat sebagai ide dan bukan sebagai sumber panduan dan pengganti pekerjaan.

Wahono (2023) dalam kanal YouTubanya menyebut bahwa chatGPT sangat membantu *user* ketika membuat penelitian, di antaranya dalam pemilihan metodologi, membantu perumusan masalah dan penentuan tujuan

dengan baik, penentuan bidang atau topik yang akan diteliti serta eksplorasi atas topik tersebut termasuk meminta artikel reviu utama dari yang terindeks SCOPUS. Namun, perlu diingat juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan ChatGPT dalam penelitian adalah menganggap hasil ChatGPT memiliki akurasi tinggi, mengambil kalimat yang digenerasi untuk tulisan ilmiah tanpa parafrase ulang, serta meminta rekomendasi ChatGPT untuk tindakan tidak bermoral.

Pada akhirnya, teknologi memang selalu membuat kontroversi dengan perubahan yang dihasilkan. Pertanyaan etika yang sering menjadi perbincangan, sangat bergantung sepenuhnya pada pengguna dan cara menggunakan fitur tersebut. Terlepas dari dampak negatifnya, kita harus mengakui bahwa ini adalah alat yang sangat berguna. Semenjak kemunculan ChatGPT, telah banyak memicu munculnya AI lain seperti Perplexity untuk menulis beserta referensinya, Tome AI untuk membuat presentasi, Grammarly untuk mengecek grammar, Anysummary untuk merangkum berbagai file pdf, docs, video, dan powerpoint, Writefull untuk membantu menulis abstrak, serta Quillbot untuk memfrase ulang. Berbagai sarana di atas, baik disadari ataupun tidak, cukup membantu para penggunanya. Selamat mencoba...

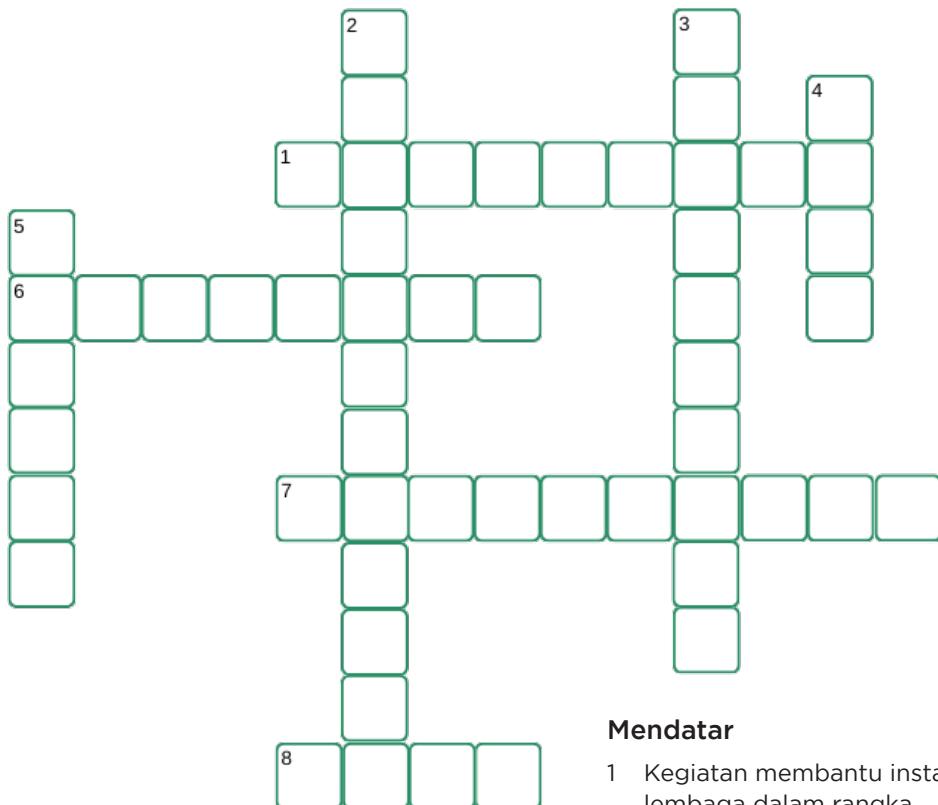
<https://tekno.tempo.co/read/1691053/viral-chatgpt-begini-fungsi-chatbot-jenis-dan-cara-kerjanya>, Maret 2023

<https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-ethics/>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230614110120-37-445772/nadiem-soroti-nasib-guru-ri-terancam-bos-chatgpt-jawab-ini>, 14 Juni 2023

https://www.youtube.com/watch?v=0_HLTCZc5CM&t=347s, Do's & Don't: chatGPT & AI-Powered Apps for Scientific Research, Romi Satrio Wahono, Mei 2023

<https://punchng.com/chatgpt-the-good-the-bad-the-ethical-and-legal-implications>, Maret 2023



Pemenang Kuis Edisi 2/2022:

**Angga Yanuar T.
Dina Anggraeni
Aidha Rukmana**

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Kirim jawaban melalui email ke:
puslitbangwas@bpkp.go.id

Mendarat

- 1 Kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah
- 6 Tim ... Pemerintah Daerah (TAPD)
- 7 *Tourism* (terjemahan)
- 8 Rasa garam

Menurun

- 2 Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (akronim)
- 3 Badan ... Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 4 Gelaran tahunan terkait Inovasi Pelayanan Publik
- 5 Dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

PUSTRAJAKWAS

